

2025-2029

RENCANA STRATEGIS BPPSDMP





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdmp.deptan.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 255/Kpts/RC.020/I/12/2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 dan untuk membuat panduan yang komprehensif bagi seluruh unit kerja dan setiap pegawai dalam mencapai tujuan organisasi, perlu ditetapkan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Rencana Startegis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
 10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 141);
 11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2025 - 2029 |
| KESATU | : | Menetapkan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan |

- KETIGA : Tahun 2029.
- : Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
- a. Rencana Kerja (Renja) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - b. Indikator Kinerja Utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
 - c. Rencana Strategis (Renstra) unit eselon II dan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk periode 5 (lima) Tahun, terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- KEEMPAT : Perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana diktum KESATU dapat dilakukan dalam hal:
- a. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - b. Tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KELIMA : Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian bersifat indikatif.
- KEENAM : Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



R. Les-t5

IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Pejabat Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 255/Kpts/RC.020/I/12/2025
TANGGAL : 31 Desember 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Kondisi Umum	10
B. Potensi dan Permasalahan	13
C. Capaian Kinerja BPPSDMP 2020 – 2024	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	43
A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian	43
B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029.....	45
C. Sasaran Program	48
D. Pohon Kinerja BPPSDMP	48
E. Manajemen Risiko Pembangunan Pembangunan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian .	50
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	52
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029	52
B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025 – 2029	55
C. Kerangka Regulasi.....	55
D. Kerangka Kelembagaan	56
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
A. Target Kinerja	59
B. Kerangka Pendanaan.....	61
BAB V PENUTUP.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PDB Sektor Pertanian dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2024	10
Gambar 2. Situasi Ketahanan Pangan Dunia dan Indonesia	10
Gambar 3. Statistik Petani Milenial dan Usaha Pertanian Nasional (ST 2023).....	11
Gambar 4. Prioritas Presiden terkait Ketahanan Pangan dan Energi.....	12
Gambar 5. Balai Penyuluhan Pertanian.....	13
Gambar 6. Sebaran UPT Pendidikan.....	14
Gambar 7. Sebaran UPT Pelatihan	14
Gambar 8. Proses Bisnis Brigade Pangan	23
Gambar 9. Perkembangan Kelompok Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2020–2024	26
Gambar 10. Perkembangan Jumlah BPP 2020-2024	27
Gambar 11. Lokasi Project SIMURP.....	29
Gambar 12. Perkembangan Peserta Program Purnawidya 2020-2024.....	30
Gambar 13. Perkembangan Sertifikasi Kompetensi 2020-2024	31
Gambar 14. P4S Petani Muda Keren Bali	31
Gambar 15. Lokasi Project READSI 2018-2024	33
Gambar 16. Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif Polbangtan Tahun 2020-2024	34
Gambar 17. Grafik Distribusi dan Kualifikasi Dosen di Polbangtan Tahun 2020-2024	35
Gambar 18. Grafik Siswa Aktif SMK-PP Negeri Tahun 2020-2024	36
Gambar 19. Grafik Pertumbuhan Jumlah Guru di SMK-PP Negeri Tahun 2020-2024.....	37
Gambar 20. Grafik Peserta Program Tugas Belajar S3 Tahun 2020-2024	39
Gambar 21. Grafik Peningkatan Pembentukan Kelompok PWMP Tahun 2020-2024	39
Gambar 22. Summary Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029.....	49
Gambar 23. Kontribusi Badan PPSDMP Pada Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029	49
Gambar 24. Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029	53
Gambar 25. Rumah Strategi Kementerian Pertanian	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Capaian Brigade Pangan Tahun 2025.....	25
Tabel 2. Capaian Program YESS Tahun 2019-2025.....	42
Tabel 3. Desain Kriteria dalam Kerangka Kelembagaan Badan PPSDMP 2025 – 2029.....	57
Tabel 4. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025 – 2029.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BADAN PPSDMP 2025 – 2029 63



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sumber daya manusia pertanian dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong regenerasi petani melalui pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan.

Renstra BPPSDMP 2025–2029 dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang transformasi sistem penyuluhan pertanian. Penyusunan ini juga mempertimbangkan kondisi aktual sektor pertanian, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, serta kebutuhan nasional untuk membangun SDM pertanian yang profesional, adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kerja sama dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari unit kerja pusat, UPT pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga para praktisi dan akademisi. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Renstra ini komprehensif dan aplikatif.

Harapan kami, dokumen Renstra BPPSDMP 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun tantangan global.



BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penopang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 28,18% dari total tenaga kerja nasional, atau setara dengan 40,76 juta pekerja. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, sektor pertanian tetap menunjukkan ketahanan, bahkan menjadi penyangga utama selama kurun waktu pandemi COVID-19 2019-2023, sebagaimana dicatat dalam pertumbuhan positif sektor pertanian ketika sektor lain mengalami kontraksi ekonomi.



Gambar 1. PDB Sektor Pertanian dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian 2024

Namun demikian, sektor ini dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Pertama, ancaman perubahan iklim yang kian nyata telah menyebabkan gangguan pola tanam, kekeringan ekstrem, serta meningkatnya risiko serangan organisme pengganggu tanaman. Kedua, krisis pangan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, gangguan pasokan akibat perang dan proteksionisme pangan menyebabkan harga beras dunia melonjak, termasuk di Jepang dan Filipina, serta diberlakukannya pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen utama seperti India dan Vietnam. Ketiga, tekanan dari sisi permintaan meningkat tajam akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta pemulihan pasca-COVID yang mendorong konsumsi pangan lebih tinggi.



Gambar 2. Situasi Ketahanan Pangan Dunia dan Indonesia

Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi kerentanan pangan yang cukup serius. Sebanyak 7–16% penduduk tergolong rawan pangan dan 21,5% anak-anak mengalami stunting. Hal ini mencerminkan urgensi untuk memperkuat sistem produksi pangan domestik, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian sebagai aktor utama.



Gambar 3. Statistik Petani Milenial dan Usaha Pertanian Nasional (ST 2023)

Sementara itu, sektor pertanian di Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa krisis regenerasi petani. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 21,93% petani perorangan berasal dari kelompok usia muda (19–39 tahun), sementara sisanya didominasi oleh petani berusia di atas 40 tahun. Jumlah petani muda usia 25–34 tahun bahkan mengalami penurunan dari 11,97% pada tahun 2013 menjadi hanya 10,24% pada 2023. Demikian pula, petani usia 35–44 tahun menurun dari 26,3% menjadi 22% dalam kurun waktu yang sama. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa generasi muda semakin menjauh dari sektor pertanian dalam satu dekade terakhir.

Lebih jauh, data BPS tahun 2019 mencatat total jumlah petani mencapai 33,4 juta orang, namun hanya sekitar 8% atau 2,7 juta orang yang tergolong sebagai petani muda (usia 20–39 tahun). Sebaliknya, sebanyak 91% petani berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas mendekati rentang usia 50–60 tahun. Selain itu, dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2018, tercatat adanya penurunan jumlah petani muda sebanyak 415.789 orang, menandakan bahwa proses regenerasi petani tidak hanya stagnan, tetapi cenderung mengalami kemunduran.

Rendahnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa sektor ini kurang menjanjikan secara ekonomi, serta masih terbatasnya akses terhadap pelatihan yang relevan, infrastruktur pendukung, dan fasilitas pembiayaan yang memadai. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya formasi tenaga penyuluhan pertanian, serta belum meratanya infrastruktur kelembagaan penyuluhan di berbagai wilayah. Akumulasi faktor-faktor ini menghambat upaya revitalisasi pertanian nasional dan memperbesar risiko krisis keberlanjutan di sektor ini dalam jangka panjang.



Presiden Prabowo Menyampaikan kembali pada Sidang Kabinet 2 Desember 2024 untuk Fokus pada 4 Program Utama Pemerintah:



- 1. SWASEMBADA PANGAN**
- 2. MAKAN BERGIZI**
- 3. KETAHANAN ENERGI (BIOFUEL)**
- 4. HILIRISASI**

Gambar 4. Prioritas Presiden terkait Ketahanan Pangan dan Energi

Menjawab tantangan tersebut, Agenda Pembangunan Nasional 2025–2029 (Astacita) melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor unggulan termasuk pertanian, serta peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diperkuat oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mendorong transformasi sistem penyuluhan menuju pertanian modern berbasis teknologi, melalui penguatan kelembagaan serta pendayagunaan penyuluhan di semua tingkat pemerintahan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memegang peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Melalui jaringan unit pelaksana teknis yang mencakup Balai Besar Pelatihan (BBPP) dan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka), BPPSDMP menyelenggarakan pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, literasi pertanian, serta fasilitasi kelembagaan petani. Selain itu, Museum Tanah dan Pertanian (Mustani) turut memperkuat fungsi edukatif BPPSDMP dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan peran strategis sektor pertanian. Sinergi antarunit ini menjadi fondasi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaku utama maupun pelaku usaha pertanian.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah dan distribusi SDM, serta infrastruktur yang belum merata. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan daya jangkau dan kualitas layanan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di berbagai wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, sektor pertanian juga menghadapi persoalan krusial berupa krisis regenerasi petani. Proporsi petani muda masih rendah, sementara sebagian besar pelaku usaha tani didominasi oleh kelompok usia lanjut. Untuk menjawab tantangan ini, BPPSDMP mendorong keterlibatan generasi muda melalui program strategis seperti Brigade Pangan. Program ini dirancang untuk mencetak petani milenial sebagai penggerak agribisnis modern dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi.

Sebagai respons komprehensif terhadap tantangan-tantangan tersebut, Renstra BPPSDMP 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis guna mempercepat transformasi SDM pertanian yang adaptif, inklusif, profesional, dan berdaya saing global. Sasaran akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan petani di tengah dinamika pembangunan nasional dan tantangan global.



B. Potensi dan Permasalahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Mandat ini dijalankan melalui dua fungsi utama: pendidikan pertanian dan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan serta pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, BPPSDMP ditopang oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan yang tersebar di seluruh Indonesia, kelembagaan perpustakaan dan literasi pertanian, serta kelembagaan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian yang didukung tenaga fungsional dan sistem manajemen kelembagaan. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi potensi penting dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi transformasi teknologi dan kebutuhan regenerasi petani.

Namun, BPPSDMP juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja. Tantangan ini tidak hanya berasal dari dinamika nasional, tetapi juga kondisi global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Guna mengidentifikasi potensi dan permasalahan digunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian

Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tidak terlepas dari peran kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang berfungsi secara optimal, yaitu:

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki wilayah binaan tersebar di 38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 5.829 Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia;



Gambar 5. Balai Penyuluhan Pertanian



- 2) Kelembagaan Pendidikan Pertanian terdiri atas Pusat Pendidikan Pertanian dan 10 UPT Pendidikan Pertanian yaitu;
- Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
 - Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
 - Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang
 - Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
 - Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
 - Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
 - Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong
 - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa;
 - SMK-PP Negeri Banjarbaru; dan
 - SMK-PP Negeri Kupang.



Gambar 6. Sebaran UPT Pendidikan

- 3) Kelembagaan Pelatihan terdiri atas Pusat Pelatihan Pertanian dan 10 UPT Pelatihan Pertanian yaitu:
- Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
 - Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
 - Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;
 - Balai Pelatihan Pertanian Jambi; dan
 - Balai Pelatihan Pertanian Lampung.



Gambar 7. Sebaran UPT Pelatihan

- 4) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
 - 5) Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
 - 6) Museum Tanah dan Pertanian
 - 7) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- b. Ketenagaan penyuluhan, widyaiswara, dosen, dan guru
- Kualitas ketenagaan sangat mempengaruhi tingkat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada petani. Untuk itu BPPSDMP memiliki tenaga penyuluhan, widyaiswara, dosen, dan guru yang terampil, kompeten dan ahli.
- Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Kementerian Pertanian bulan Juni tahun 2025:
- 1) Jumlah penyuluhan pertanian tercatat 61.814 orang, terdiri atas 23.229 penyuluhan PNS, 15.641 PPPK, 22.708 penyuluhan swadaya, dan 236 penyuluhan swasta.
 - 2) Jumlah widyaiswara (WI) sebesar 186 orang dengan tingkat pendidikan S3: 26 orang , S2: 160 orang.
 - 3) Jumlah dosen sebesar 180 orang dengan tingkat pendidikan S3: 99 orang dan S2: 81 orang.
 - 4) Jumlah guru sebanyak 67 orang dengan tingkat pendidikan S3: 1 orang, S2: 48 orang, S1: 16 orang, dan D-IV: 2 orang.
- c. Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.
- Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundungan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:
- 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - Undang-Undang Terkait Lainnya
 - o Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b) Peraturan Pemerintah Lainnya (bersifat umum) PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Peraturan Presiden
 - a) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
 - 4) Peraturan Menteri Pertanian
 - a) Terkait Organisasi dan Tata Kerja

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI).
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup BPPSDMP.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Lingkungan BPPSDMP.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP.
- b) Terkait Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Bogor.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Gowa.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Malang.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Manokwari.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Medan.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Yogyakarta-Magelang.
- c) Terkait Pedoman Teknis dan Pelaksanaan Program
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan SDM Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani).
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

- 
- d) Peraturan Menteri Pendukung Lainnya
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72 Tahun 2014 tentang Statuta Pendidikan Vokasi Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Sama Penyuluhan.
2. Kelemahan (*Weakness*)
- a. Kualitas dan Distribusi Penyuluhan
- Terdapat ketimpangan jumlah dan kompetensi penyuluhan antarwilayah yang berdampak pada perbedaan intensitas pendampingan dan jangkauan layanan penyuluhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan distribusi penyuluhan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan wilayah, komoditas unggulan, dan karakteristik pertanian setempat. Selain itu, penyebaran pelatihan peningkatan kompetensi penyuluhan juga belum merata, sehingga kemampuan penyuluhan dalam mengadopsi teknologi pertanian modern dan membina kelembagaan ekonomi petani masih bervariasi antar daerah.
- b. Regenerasi Petani
- Keterlibatan generasi muda di sektor pertanian masih terbatas, ditandai oleh dominasi petani usia menengah hingga tua dan belum memadainya jumlah petani muda untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian. Program regenerasi seperti Petani Milenial telah berjalan, namun cakupan, intensitas, dan kualitas pendampingan masih perlu diperluas serta diintegrasikan secara lebih terstruktur dengan pelatihan, dukungan pembiayaan, akses lahan, dan pemasaran. Selain itu, penguatan pendampingan berkelanjutan serta promosi pertanian sebagai pilihan karier yang modern dan prospektif masih diperlukan agar lebih menarik bagi generasi muda, terutama di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan.
- c. Kelembagaan Petani
- Sebagian kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani masih menunjukkan variasi kapasitas kelembagaan, di mana sebagian telah tertata dari sisi tata kelola dan jejaring pemasaran, sementara lainnya masih lemah dalam administrasi, pencatatan usaha, dan akses pasar. Kondisi ini dipengaruhi oleh intensitas pendampingan yang belum seragam, modul pembinaan yang belum terstandardisasi, serta terbatasnya integrasi pembinaan kelembagaan dengan dukungan permodalan dan kemitraan usaha, sehingga tanpa pendampingan berkelanjutan dan dukungan terarah, sebagian kelembagaan berisiko tetap berada pada kapasitas yang rendah.
- d. Transisi Kelembagaan Penyuluhan
- Proses transisi kelembagaan penyuluhan dari daerah ke pusat sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional masih berada dalam tahap penyesuaian, yang berdampak pada adanya perbedaan pemahaman terkait mekanisme kerja, sistem pelaporan, dan pembagian peran antarunit di lapangan. Variasi tingkat kesiapan antarwilayah tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan waktu sosialisasi, belum seragamnya pedoman operasional, serta perlunya penguatan koordinasi antara unit pusat dan daerah, sehingga

keberhasilan transisi sangat ditentukan oleh keseragaman pemahaman dan ketersediaan panduan teknis yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan.

e. Efisiensi dan Keberlanjutan Pendanaan

Pendanaan program BPPSDMP masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan prioritas anggaran nasional, sehingga penyesuaian alokasi pada periode tertentu berdampak pada perubahan target pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian hasil. Ketiadaan strategi pembiayaan berjangka menengah hingga panjang berpotensi menghambat pencapaian dampak program secara optimal, sementara pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan swasta, CSR, dan hibah internasional masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan strategi diversifikasi sumber pendanaan menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi anggaran tahunan yang bersifat fluktuatif.

f. Cakupan Pelatihan

Jumlah peserta pelatihan yang difasilitasi setiap tahun masih relatif terbatas dibandingkan dengan total populasi petani, sehingga peningkatan kapasitas SDM pertanian belum merata, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kegiatan pelatihan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas lembaga pelatihan, ketersediaan fasilitator, serta jangkauan lokasi pelatihan yang belum mencakup daerah terpencil, sehingga perluasan akses melalui peningkatan kapasitas, pendekatan pelatihan bergerak, dan pemanfaatan metode daring menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

g. Metode dan Evaluasi Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan masih cenderung menggunakan metode klasikal yang seragam, sementara kebutuhan petani beragam sesuai komoditas, lokasi, dan skala usaha, sehingga materi pelatihan belum sepenuhnya aplikatif bagi seluruh peserta. Selain itu, evaluasi pascapelatihan belum terintegrasi secara sistematis dengan mekanisme pendampingan di lapangan, yang menyebabkan dampak pelatihan terhadap perubahan perilaku usaha tani belum terdokumentasi secara optimal, sehingga diperlukan penguatan sistem evaluasi, diversifikasi metode pelatihan, dan tindak lanjut berbasis pendampingan agar hasil pelatihan lebih terukur.

h. Inklusi Gender dan Kelompok Rentan

Keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam pelatihan telah diupayakan, namun cakupannya masih terbatas. Program pelatihan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata, baik dari sisi jadwal, lokasi, maupun metode pelaksanaan, serta ketersediaan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan masih perlu diperluas. Penguatan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya lokal diperlukan untuk memperluas jangkauan dan memastikan kesempatan pengembangan kapasitas yang setara.

i. Transformasi Digital

Penerapan teknologi digital dalam penyuluhan dan pelatihan masih berlangsung secara bertahap, dengan tingkat pemanfaatan platform digital yang bervariasi antarwilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya ketersediaan infrastruktur TIK

serta variasi tingkat literasi digital di kalangan penyuluhan, sehingga diperlukan perencanaan digitalisasi yang lebih menyeluruh dan penguatan pelatihan literasi digital secara merata untuk mempercepat proses transformasi.

j. Sistem Informasi

Pengelolaan data penyuluhan, petani, alumni pelatihan, dan kelembagaan saat ini masih tersebar pada beberapa sistem yang berdiri sendiri, sehingga menyulitkan analisis secara menyeluruh akibat keterbatasan integrasi data. Perbedaan format, variabel, dan platform menjadi hambatan dalam pemadanan data, sehingga pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi penting untuk mendukung perencanaan program yang lebih akurat dan berbasis bukti.

k. Adopsi *Smart Farming*

Pemanfaatan teknologi pertanian cerdas, seperti IoT, drone, dan sistem pertanian presisi, di tingkat petani masih terbatas sehingga potensi peningkatan efisiensi dan produktivitas belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan perangkat pendukung pelatihan, kebutuhan investasi yang relatif tinggi, serta belum masifnya pelaksanaan program pelatihan smart farming, sehingga penguatan peran penyuluhan dalam mengenalkan, mendampingi, dan mendorong adopsi teknologi tersebut menjadi kunci percepatan implementasi di lapangan.

3. Peluang (*Opportunity*)

a. Dukungan Kebijakan Nasional yang Semakin Kuat

Agenda ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan dari desa menjadi prioritas pemerintah 2025-2029. Harmonisasi sasaran Renstra BPPSDMP dengan RPJMN, Perpres swasembada pangan, serta Inpres penguatan penyuluhan membuka akses lebih besar terhadap regulasi pendukung, pendanaan APBN, dan sinergi lintas kementerian.

b. Dukungan Kebijakan Nasional yang Semakin Kuat

RPJMN 2025–2029 menempatkan ketahanan pangan, hilirisasi pertanian, dan pembangunan berbasis desa sebagai prioritas nasional yang diperkuat melalui Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden, termasuk Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penguatan Penyuluhan Pertanian yang memberikan landasan hukum bagi penguatan kelembagaan dan SDM penyuluhan secara terintegrasi pusat–daerah. Keselarasan arah kebijakan tersebut dengan sasaran Renstra BPPSDMP membuka peluang penguatan legitimasi program, perluasan dukungan pendanaan APBN, serta sinergi lintas kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Bappenas, sehingga BPPSDMP dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan pelatihan, meningkatkan kualitas penyuluhan, dan mempercepat pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan target nasional.

c. Pemberdayaan Petani Pedesaan dan Hilirisasi Agribisnis

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan petani melalui korporatisasi, pengembangan P4S, serta pembangunan industri pengolahan berbasis desa membuka peluang strategis bagi BPPSDMP untuk memperluas peran hingga tingkat akar rumput dan selaras dengan agenda hilirisasi pertanian. Dalam konteks tersebut, BPPSDMP dapat

mengintegrasikan pelatihan pascapanen, pengolahan hasil, dan manajemen usaha tani berbasis pasar ke dalam kurikulum vokasi dan program pendampingan, sehingga petani tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga mampu mengakses rantai nilai agribisnis yang lebih luas, memperkuat posisi tawar, dan meningkatkan pendapatan.

d. Momentum Regenerasi Petani dan Antusiasme Wirausaha Milenial

Meningkatnya minat generasi muda terhadap kegiatan pertanian, sebagaimana tercermin dalam partisipasi pada program Petani Milenial, urban farming, dan kompetisi startup agritech, merupakan peluang strategis bagi BPPSDMP untuk memperbarui desain program pelatihan agar lebih selaras dengan karakteristik generasi muda yang interaktif, berbasis teknologi digital, dan berorientasi kewirausahaan. Melalui penyediaan fasilitas inkubasi usaha, akses permodalan, serta pendampingan bisnis berbasis inovasi, BPPSDMP berpotensi melahirkan wirausahawan muda pertanian yang produktif, adaptif, dan berperan sebagai agen perubahan dalam modernisasi sektor pertanian, sekaligus memperkuat keberlanjutan regenerasi SDM pertanian secara nasional.

e. Akselerasi Digitalisasi dan Pertanian 4.0

Perluasan infrastruktur internet pedesaan, penurunan harga perangkat teknologi pertanian seperti sensor IoT dan drone, serta meningkatnya ketersediaan aplikasi smart farming membuka peluang strategis bagi BPPSDMP untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem penyuluhan dan pelatihan, sejalan dengan agenda transformasi digital pertanian nasional melalui pengembangan platform e-government sektor pertanian. Pemanfaatan peluang tersebut melalui pengembangan e-learning, penyuluhan virtual, dan demplot teknologi presisi berbasis data berpotensi meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya operasional, serta memperluas jangkauan layanan penyuluhan hingga wilayah terpencil.

f. Kenaikan Permintaan Pasar Domestik dan Global

Pertumbuhan populasi, pergeseran pola konsumsi menuju produk sehat dan berkelanjutan, serta meningkatnya peluang ekspor akibat penguatan harga komoditas di pasar internasional membuka ruang pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, BPPSDMP dapat mengarahkan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan petani dalam pemenuhan standar mutu, sertifikasi produk, dan manajemen agribisnis berorientasi ekspor, sehingga meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani dan ketahanan ekonomi nasional.

g. Peluang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan utama sektor pertanian sekaligus membuka peluang strategis bagi BPPSDMP melalui pemanfaatan berbagai skema pendanaan dan insentif pemerintah, termasuk pendanaan iklim, program carbon farming, dan dukungan anggaran adaptasi. Melalui pengembangan dan integrasi modul pelatihan yang mencakup penggunaan varietas tahan cekaman, pengelolaan air presisi, serta praktik budidaya rendah emisi, BPPSDMP berperan meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim dan memperkuat ketahanan produksi pangan secara berkelanjutan.

h. Kemitraan Internasional dan Program Donor

Indonesia memiliki rekam jejak positif sebagai pusat pelatihan pertanian dalam kerangka kerja sama Selatan–Selatan, yang menjadi modal strategis bagi BPPSDMP untuk memperluas kemitraan internasional melalui skema hibah, triangular cooperation, dan proyek kolaborasi dengan lembaga internasional. Pemanfaatan kemitraan tersebut berpotensi menghadirkan teknologi mutakhir, kurikulum berstandar global, serta sumber pendanaan pendukung program strategis, sekaligus meningkatkan reputasi internasional BPPSDMP dan memperluas pertukaran pengetahuan serta pengiriman tenaga ahli ke negara mitra.

i. Penguatan Skema Pembiayaan dan Insentif Fiskal

Kebijakan pemerintah yang memperluas akses pembiayaan sektor pertanian melalui KUR dan alokasi DAK tematik penyuluhan membuka peluang signifikan bagi BPPSDMP untuk mengembangkan kemitraan pembiayaan pelatihan dan pendampingan guna menjamin kesinambungan program strategis multi-tahun. Pemanfaatan insentif fiskal tersebut dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana pelatihan, pengembangan materi berbasis teknologi, dan penguatan pendampingan kelembagaan petani, sehingga program tetap berkelanjutan di tengah tekanan fiskal serta mampu memperluas cakupan sasaran hingga wilayah dengan keterbatasan anggaran daerah.

j. Integrasi Standar Kompetensi dan Sertifikasi Profesi

Penerapan SKKNI di bidang pertanian, sertifikasi penyuluhan, serta rencana sertifikasi profesi petani oleh BNSP membuka peluang strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kerja sektor pertanian, termasuk peningkatan nilai upah dan mobilitas kerja di pasar domestik maupun ASEAN. Dalam konteks tersebut, BPPSDMP dapat berperan sebagai lembaga pelatihan terakreditasi yang mempersiapkan peserta hingga memenuhi standar dan lulus uji sertifikasi, sehingga lulusan pelatihan tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga pengakuan resmi yang meningkatkan kredibilitas di hadapan industri dan pasar kerja.

k. Inklusi Gender dan Kelompok Rentan

Penguatan kebijakan pengarusutamaan gender, perluasan akses pembiayaan bagi wanita tani, serta program pemberdayaan penyandang disabilitas membuka peluang bagi BPPSDMP untuk memperluas basis sasaran program pelatihan secara inklusif, sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan. Melalui perancangan pelatihan yang memperhatikan metode, jadwal, dan pendekatan sosial budaya yang ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya, BPPSDMP dapat memperluas dampak sosial program tidak hanya dalam peningkatan keterampilan, tetapi juga dalam penguatan peran kelompok rentan dalam pembangunan pertanian.

l. Kolaborasi Lintas Kementerian dan Platform Data Terpadu

Inisiatif Satu Data Pertanian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kominfo membuka peluang strategis untuk integrasi data SDM pertanian, lahan, dan kelembagaan secara nasional, sehingga mendukung perencanaan, penargetan program, dan evaluasi berbasis bukti yang lebih

akurat. Pemanfaatan platform data terpadu tersebut memungkinkan BPPSDMP memperbaiki pemetaan kebutuhan pelatihan, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, sehingga intervensi yang dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata di lapangan.

4. Tantangan (*Threat*)

a. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Geopolitik

Ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh fluktuasi harga komoditas, volatilitas pasar internasional, dan dinamika geopolitik berpotensi mengganggu stabilitas permintaan, harga hasil pertanian, serta arus eksport, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan pendapatan petani dan efektivitas program peningkatan kapasitas BPPSDMP. Selain itu, ketergantungan pada impor input pertanian strategis seperti pupuk, benih tertentu, dan alat mesin pertanian meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal, sehingga diperlukan strategi antisipatif melalui diversifikasi sumber pasok dan penguatan produksi domestik guna menjaga keberlanjutan pelaksanaan program.

b. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

Perubahan iklim menimbulkan tantangan signifikan bagi sektor pertanian melalui perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan intensitas kejadian ekstrem yang berpotensi mengganggu kalender tanam, menurunkan produktivitas, serta merusak infrastruktur pendukung pelatihan dan demonstration farm. Dampak bencana hidrometeorologi tersebut dapat menghambat pelaksanaan pendampingan dan menurunkan kualitas serta keberlanjutan output program, sehingga tanpa integrasi strategi adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana yang responsif terhadap kondisi lokal, pencapaian target kinerja BPPSDMP berisiko tidak optimal.

c. Penurunan Jumlah dan Usia Petani

Fenomena alih fungsi lahan pertanian, urbanisasi, serta terbatasnya insentif bagi generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian telah berkontribusi terhadap penurunan jumlah petani aktif, yang mengancam ketersediaan tenaga kerja pertanian dan ketahanan pangan nasional. Kondisi ini diperparah oleh dominasi petani berusia di atas 50 tahun dengan keterbatasan adaptasi terhadap teknologi dan inovasi, sehingga tanpa program regenerasi yang efektif dan berkelanjutan, terdapat risiko kekurangan tenaga kerja produktif yang mampu mengelola usaha tani secara modern dan menjamin kesinambungan produksi pertanian dalam jangka panjang.

d. Ketimpangan Akses Digital dan Infrastruktur Penyuluhan

Keterbatasan akses internet, pasokan listrik, dan sarana penyuluhan di wilayah 3T menjadi hambatan signifikan dalam pemerataan transformasi pertanian berbasis teknologi, yang menghambat penerapan penyuluhan digital, pembelajaran daring, serta pemanfaatan aplikasi pertanian pintar. Ketimpangan infrastruktur tersebut memperlebar kesenjangan kualitas layanan penyuluhan antarwilayah dan membatasi efektivitas program digitalisasi pertanian di tingkat pusat, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar di wilayah dengan keterbatasan akses.



e. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dan Tingkat Pemerintahan

Perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan penyuluhan dan pelatihan berpotensi menimbulkan duplikasi, kesenjangan, dan tumpang tindih program, sehingga alokasi sumber daya menjadi kurang optimal dan pencapaian sasaran strategis BPPSDMP terhambat. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektor serta keterbatasan integrasi data antarinstansi, sehingga tanpa harmonisasi kebijakan dan mekanisme kerja yang terintegrasi, pelaksanaan program berisiko berjalan parsial dan kurang memberikan dampak optimal bagi peningkatan kapasitas SDM pertanian.

f. Terbatasnya Alokasi Anggaran dan Ketergantungan Dana APBN

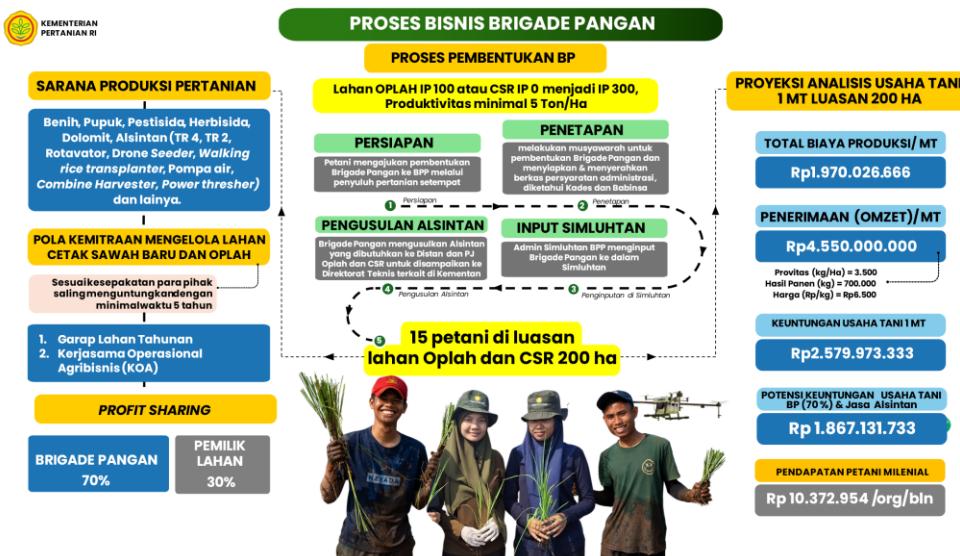
Keterbatasan ruang fiskal sektor pertanian membatasi kemampuan BPPSDMP dalam merancang dan melaksanakan program secara luas dan berkelanjutan, sementara ketergantungan yang tinggi pada pendanaan APBN meningkatkan kerentanan terhadap perubahan prioritas kebijakan dan dinamika ekonomi. Tanpa diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, lembaga donor, atau skema pembiayaan alternatif, fleksibilitas BPPSDMP dalam menjaga kesinambungan program strategis dan merespons tantangan eksternal secara cepat dan efektif akan tetap terbatas.

C. Capaian Kinerja BPPSDMP 2020 – 2024

1. Program Brigade Pangan

a. Proses Bisnis Brigade Pangan

Program Brigade Pangan merupakan kebijakan strategis BPPSDMP untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan peran petani milenial sebagai motor penggerak agribisnis modern. Program ini diarahkan pada pengelolaan usaha tani padi berbasis teknologi dan kelembagaan ekonomi yang profesional, terutama di lokasi Optimasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah pada 14 provinsi prioritas. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, penyuluhan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat, dengan tujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan pendapatan petani secara berkelanjutan.



Gambar 8. Proses Bisnis Brigade Pangan

Model bisnis Brigade Pangan (BP) merupakan skema kemitraan usaha tani yang memadukan penyediaan sarana produksi, penggunaan alat-alat modern, serta manajemen budidaya pada lahan Oplah maupun CSR. Proses bisnis diawali dengan penetapan kelembagaan petani sebagai operator serta penegasan pola kerja sama dengan pemilik lahan. Penerapan BP diarahkan untuk meningkatkan intensitas tanam dari IP rendah menuju IP tinggi serta mendorong produktivitas selama musim tanam dengan capaian yang secara teknis dapat mencapai lebih dari 5 ton per hektare pada komoditas padi.

Berdasarkan simulasi operasional pada luasan sekitar 200 hektare, usaha tani dapat menghasilkan omzet dalam kisaran miliaran rupiah per musim tanam dengan struktur biaya yang relatif efisien melalui pemanfaatan alat-alat. Ilustrasi pembagian keuntungan memperlihatkan bahwa skema bagi hasil 70 persen bagi operator BP dan 30 persen bagi pemilik lahan dapat memberikan nilai usaha yang signifikan bagi kedua pihak. Selain itu, operator juga memperoleh pendapatan tambahan dari usaha alat-alat sehingga memperkuat kelayakan finansial model dan meningkatkan daya tarik usaha tani bagi petani muda.

Dengan konfigurasi tersebut, estimasi pendapatan petani milenial dalam model BP berada pada kisaran jutaan hingga belasan juta rupiah per orang per bulan, bergantung pada luasan garap, produktivitas, harga komoditas, serta efisiensi input dan pembiayaan. Model BP memberikan implikasi positif terhadap percepatan regenerasi petani, peningkatan produktivitas, serta penciptaan nilai tambah agribisnis berbasis kelembagaan yang terukur dan berkelanjutan.

b. Capaian Brigade Pangan

Berdasarkan data Brigade Pangan 2025 yang tercatat dalam aplikasi, realisasi pembentukan BP pada lahan Oplah menunjukkan capaian yang secara umum telah melampaui target agregat nasional. Pada sebagian besar provinsi, realisasi pembentukan BP pada lahan Oplah mencapai atau mendekati target, bahkan pada sejumlah provinsi berada di atas 100 persen. Hal ini mengindikasikan respons positif dan kesiapan kelembagaan petani terhadap model operasi Brigade Pangan, termasuk dalam proses verifikasi dan penetapan lahan.

Pada skema CSR, capaian realisasi juga menunjukkan performa yang relatif baik pada beberapa provinsi yang memiliki alokasi CSR, meskipun terdapat variasi capaian antarwilayah. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan kesiapan pelaku CSR, ketersediaan lahan, serta mekanisme kemitraan yang masih memerlukan penguatan di daerah tertentu. Secara keseluruhan, capaian realisasi BP pada Oplah dan CSR berada dalam kisaran tinggi, dengan persentase agregat nasional yang menunjukkan kinerja positif dalam tahap awal implementasi Brigade Pangan.

Hasil ini memberikan indikasi bahwa desain kelembagaan BP dapat diadopsi dengan cepat oleh daerah, baik pada lahan Oplah maupun CSR, serta memberikan peluang percepatan bagi konsolidasi kelembagaan, peningkatan luas garap, dan penguatan basis data lokasi BP untuk musim tanam berikutnya. Variasi antarprovinsi menjadi dasar untuk penajaman

strategi pendampingan, dukungan teknis, serta pola kemitraan pada fase implementasi lanjutan.

Tabel 1. Data Capaian Brigade Pangan Tahun 2025

NO	PROVINSI	TARGET BP		REALISASI BP		PERSENTASE	
		OPLAH	CSR	OPLAH	CSR	OPLAH	CSR
1	Aceh	93	-	99	-	106.45%	-
2	Sumatera Utara	233	-	233	-	100.00%	-
3	Sumatera Barat	124	-	125	-	100.81%	-
4	Riau	90	3	90	3	100.00%	100.00%
5	Jambi	39	5	39	5	100.00%	100.00%
6	Sumatera Selatan	242	166	242	166	100.00%	100.00%
7	Bengkulu	53	7	53	7	100.00%	100.00%
8	Lampung	96	-	98	-	102.08%	-
9	Jawa Barat	98	-	98	-	100.00%	-
10	Jawa Tengah	58	-	58	-	100.00%	-
11	Jawa Timur	88	-	95	-	107.95%	-
12	Banten	39	-	41	-	105.13%	-
13	Nusa Tenggara Barat	50	-	50	-	100.00%	-
14	Nusa Tenggara Timur	82	1	82	1	100.00%	100.00%
15	Kalimantan Barat	105	12	105	14	100.00%	116.67%
16	Kalimantan Tengah	10	100	10	73	100.00%	73.00%
17	Kalimantan Selatan	95	98	95	98	100.00%	100.00%
18	Kalimantan Timur	69	-	70	-	101.45%	-
19	Kalimantan Utara	50	1	51	1	102.00%	100.00%
20	Sulawesi Tengah	-	12	-	12	-	100.00%
21	Sulawesi Selatan	306	32	306	32	100.00%	100.00%
22	Sulawesi Barat	-	5	-	5	-	100.00%
23	Papua Selatan	41	87	41	87	100.00%	100.00%
24	Sulawesi Tenggara	-	34	-	28	-	82.35%
TOTAL		2,061	631	2,081	532	100.97%	84.31%

2. Penyuluhan Pertanian

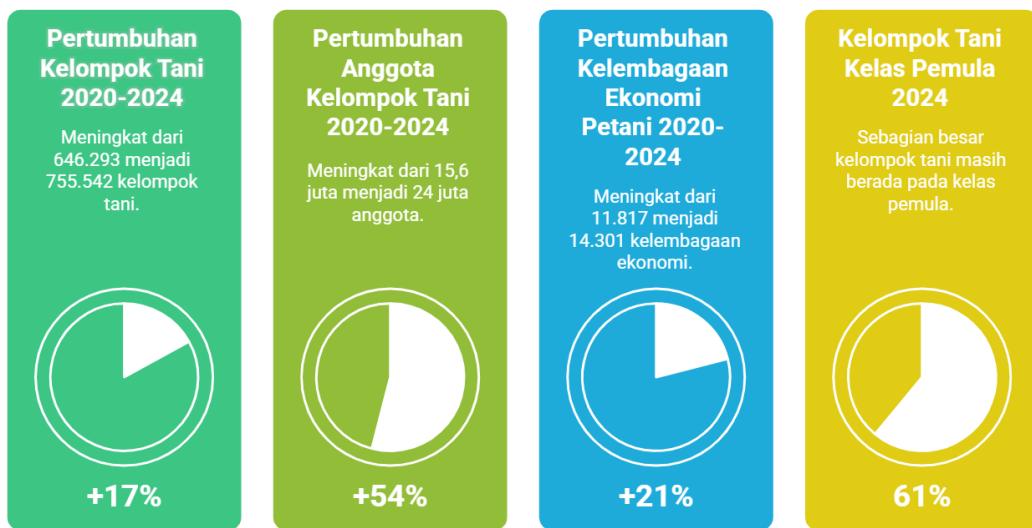
a. Kelembagaan Petani

Selama periode 2020–2024, telah terjadi peningkatan signifikan dalam pembentukan kelembagaan petani. Jumlah kelompok tani meningkat dari 646.293 pada tahun 2020 menjadi 755.542 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah anggota kelompok tani dari 15,6 juta menjadi 24 juta orang. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan peran kelembagaan sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Di samping itu, jumlah kelembagaan ekonomi petani juga mengalami pertumbuhan positif, dari 11.817 pada tahun 2020 menjadi 14.301 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai program pembinaan dan fasilitasi yang mendorong kelompok tani untuk bertransformasi menjadi kelembagaan usaha tani yang mandiri dan berbasis agribisnis.

Namun demikian, meskipun secara kuantitatif mengalami peningkatan, sebagian besar kelompok tani masih berada pada kelas pemula, yaitu sebesar 61% dari total poktan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi pembinaan berkelanjutan dan berjenjang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menuju kelompok madya dan utama.

Jumlah gapoktan relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu berkisar pada angka 64 ribuan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mendorong konsolidasi kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola usaha kolektif, memperkuat fungsi pelayanan bersama, serta membuka akses pasar dan pembiayaan secara lebih efektif.



Gambar 9. Perkembangan Kelompok Tani dan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2020–2024

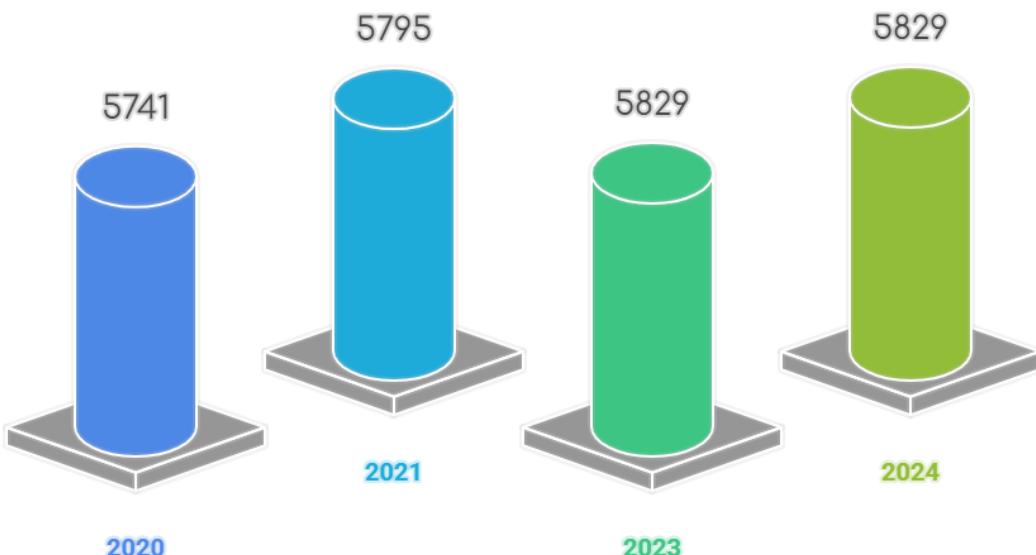
Capaian tersebut juga memperlihatkan perbedaan distribusi wilayah yang signifikan. Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menjadi kontributor terbesar dalam jumlah poktan dan anggotanya. Ke depan, wilayah-wilayah ini berpotensi dikembangkan sebagai lokus penguatan kelembagaan berbasis kawasan dan digitalisasi pertanian.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa program penguatan kelembagaan petani telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan kualitas dan kesinambungan pembinaan agar mampu menjawab tantangan modernisasi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Sumber: Buku Statistik Penyuluhan Pertanian 2024

b. Kelembagaan penyuluhan

Selama periode 2020–2024, jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 5.741 unit pada tahun 2020 menjadi 5.829 unit pada tahun 2023 dan bertahan pada angka tersebut hingga 2024, berdasarkan data Pusat Penyuluhan Pertanian Semester II Tahun 2024 yang diolah oleh Sekretariat BPPSDMP. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 54 unit, yang mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam penguatan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan melalui berbagai intervensi BPPSDMP, termasuk revitalisasi kelembagaan, penguatan fungsi BPP, serta integrasi perencanaan pusat dan daerah. Pada tahun 2024, struktur kelembagaan penyuluhan terdiri dari 38 dinas tingkat provinsi, 514 dinas/instansi penyuluhan kabupaten, dan 5.829 BPP sebagai simpul utama layanan penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan petani dan kelembagaan tani.



Gambar 10. Perkembangan Jumlah BPP 2020-2024

Terdapat ketimpangan Distribusi BPP antarprovinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Timur (589 unit), Jawa Tengah (553 unit), dan Jawa Barat (491 unit), sementara provinsi di wilayah Papua memiliki jumlah relatif rendah, seperti Papua Selatan (27 unit), Papua Tengah (23 unit), dan Papua Barat Daya (23 unit). Dari total 6.842 kecamatan di Indonesia, masih terdapat 1.013 kecamatan atau sekitar 15 persen yang belum memiliki BPP, yang menunjukkan perlunya strategi percebaran dan pemerataan kelembagaan penyuluhan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan keberhasilan BPPSDMP dan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan infrastruktur kelembagaan penyuluhan, namun tantangan ke depan terletak pada percepatan pembentukan BPP di kecamatan yang belum terlayani serta penguatan fungsi BPP agar didukung tenaga penyuluhan dan sarana prasarana yang memadai.

Sumber: Buku Statistik Penyuluhan Pertanian 2024

c. Ketenagaan penyuluhan

Berdasarkan data Pusat Penyuluhan Pertanian Semester II Tahun 2024, jumlah total penyuluhan pertanian selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan. Jumlah penyuluhan meningkat dari 67.135 orang pada tahun 2020 menjadi 68.521 orang pada 2021, namun kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 65.274 orang pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah penyuluhan PNS dan THL-TBPP. Penyuluhan PNS turun dari 25.810 orang pada tahun 2020 menjadi 22.883 orang pada tahun 2024 akibat tingginya angka pensiun yang tidak diimbangi rekrutmen baru, sementara penyuluhan THL-TBPP mengalami penurunan sangat tajam dari 11.788 orang pada tahun 2020 menjadi 1.129 orang pada tahun 2024, seiring kebijakan peralihan status ke ASN melalui skema PPPK dan penghentian perekrutan THL baru.

Di tengah tren tersebut, penyuluhan PPPK menjadi penopang utama ketersediaan tenaga penyuluhan dengan peningkatan dari 11.404 orang pada tahun 2021 menjadi 13.803 orang

pada tahun 2024. Penyuluhan swadaya tetap menjadi kelompok terbesar dengan jumlah relatif stabil, dari 29.397 orang pada tahun 2020, sempat meningkat menjadi 30.118 orang pada 2021, lalu menurun dan stabil pada angka 26.957 orang pada 2023–2024, yang menunjukkan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan. Sementara itu, penyuluhan swasta meskipun jumlahnya kecil, menunjukkan peningkatan signifikan dari 155 orang pada tahun 2022 menjadi 502 orang pada tahun 2023 dan tetap pada angka tersebut pada 2024, mencerminkan meningkatnya keterlibatan dunia usaha. Perubahan komposisi ini menegaskan perlunya strategi regenerasi penyuluhan, pemetaan kebutuhan SDM penyuluhan di tingkat kecamatan, serta penguatan sistem rekrutmen dan pembinaan agar layanan penyuluhan tetap optimal dan merata secara nasional.

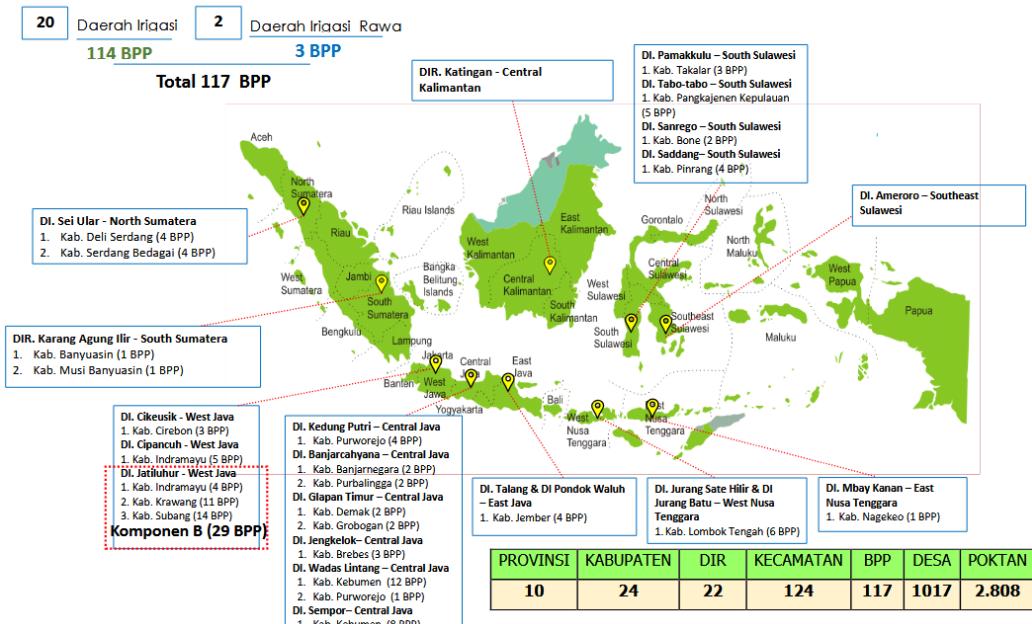
Sumber: Buku Statistik Penyuluhan Pertanian 2024

d. Program SIMURP

Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan inisiatif kerja sama untuk meningkatkan kapasitas petani melalui penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) sekaligus mendukung modernisasi sistem irigasi. Proyek ini dilaksanakan pada periode 2019–2024 di 13 provinsi dan 64 kabupaten/kota, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan fokus penguatan ketahanan pangan nasional pada kawasan pertanian strategis berbasis irigasi.

Capaian kinerja utama (Project Development Objective/PDO) yang ditetapkan oleh World Bank dan AIIB, yaitu peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 180 menjadi 200, berhasil dilampaui. Berdasarkan pengukuran citra satelit SIMOTANDI Kementerian Pertanian, IP padi di lokasi SIMURP meningkat dari 198 (2022) menjadi 207 (2023) dan mencapai 216 (2024). Capaian indikator antara (Intermediate Objectives/IOS) juga menunjukkan hasil positif, dengan realisasi 515 petani pada Komponen A (target 300) dan 380 petani pada Komponen B (target 587), yang secara keseluruhan mencerminkan peningkatan layanan irigasi bagi petani.

Dari sisi jangkauan penerima manfaat, capaian Calon Petani Calon Lahan (CPCL) melampaui target, dari rencana 2.808 kelompok tani (70.200 petani) menjadi 5.685 kelompok tani dan 164.000 petani yang tersebar di 117 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada 10 provinsi lokasi SIMURP. Kegiatan CSA Scaling Up dilaksanakan di 48 lokasi pada 24 kabupaten, dengan peningkatan produktivitas padi sebesar 0,6–0,8 ton/ha pada demplot CSA dan rata-rata 1,24 ton/ha pada hamparan luas 25–50 ha, sehingga jumlah rumah tangga petani penerima manfaat meningkat menjadi 854.000 RTP, melebihi target 791.000 RTP.



Gambar 11. Lokasi Project SIMURP

Selain peningkatan produktivitas, SIMURP juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, dengan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 32 persen (2021) dan meningkat menjadi 35 persen (2023) dibandingkan praktik konvensional. Penguatan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) turut mendorong tumbuhnya usaha produktif, meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, serta memperkuat keberlanjutan adopsi teknologi CSA di tingkat lapangan.

Sumber: Laporan Akhir Project Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project 2019-2024

e. Program IPDMIP

Proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) dilaksanakan pada 74 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di 16 provinsi dan 64 kabupaten di Indonesia, dengan fokus pada penguatan kelembagaan petani pemakai air, peningkatan produktivitas, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Implementasi proyek mencakup wilayah Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung), Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), serta Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah), dengan penekanan pada peningkatan efisiensi tata kelola air dan penerapan praktik pertanian modern berbasis Climate Smart Agriculture (CSA).

Dari sisi infrastruktur, IPDMIP telah merehabilitasi jaringan irigasi pada lebih dari 300.000 hektar lahan pertanian, meliputi saluran primer, sekunder, dan tersier, yang berdampak pada peningkatan efisiensi distribusi air serta kenaikan intensitas tanam dari rata-rata 1,2 kali menjadi lebih dari 2 kali tanam per tahun di sebagian besar lokasi. Pada aspek kelembagaan, proyek memperkuat lebih dari 5.000 kelompok P3A, GP3A, dan IP3A melalui pelatihan manajemen kelembagaan, perencanaan operasional, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif, sehingga kelembagaan petani lebih efektif dalam pengaturan jadwal tanam, distribusi air, dan penyelesaian konflik.

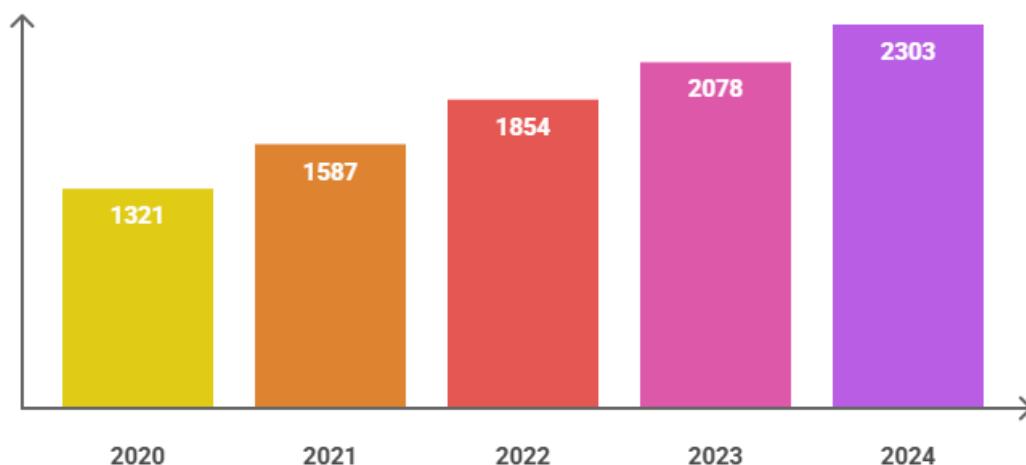


Dalam pengembangan kapasitas SDM, IPDMIP melatih puluhan ribu petani terkait praktik CSA, termasuk penggunaan varietas tahan cekaman, teknik budidaya hemat air seperti System of Rice Intensification (SRI), pemupukan berimbang, serta pemanfaatan teknologi digital sederhana dan teknologi drone untuk pemupukan dan pemantauan tanaman di beberapa lokasi. Dampak ekonomi yang dihasilkan tercermin dari peningkatan pendapatan rumah tangga petani sebesar 15–25 persen, didukung oleh kenaikan produktivitas padi, diversifikasi usaha tani ke komoditas hortikultura bernilai tinggi, serta terbentuknya kemitraan dengan offtaker yang menjamin pemasaran dan stabilitas harga. Dari sisi keberlanjutan, IPDMIP terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan dokumen tata kelola irigasi partisipatif yang diadopsi pemerintah daerah, sehingga manfaat proyek tetap berlanjut pasca periode implementasi..

3. Pelatihan Pertanian

a. Purnawidya Pelatihan

Program purnawidya menjadi bagian akhir dari proses pelatihan yang menandai kelulusan peserta serta memberikan penguatan terhadap kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.303 peserta telah mengikuti purnawidya, terdiri dari 1.174 laki-laki dan 1.129 perempuan, dengan distribusi yang relatif merata secara gender.



Gambar 12. Perkembangan Peserta Program Purnawidya 2020-2024

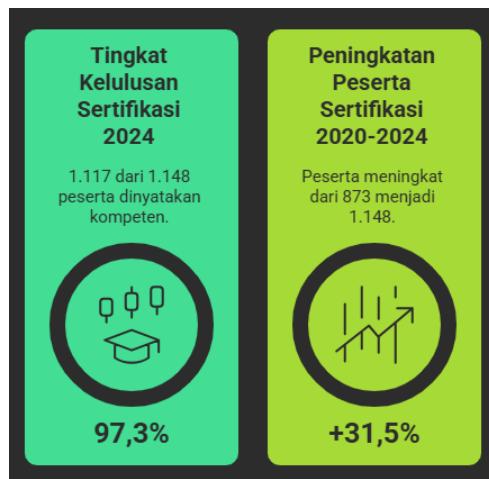
Dilihat dari tren lima tahun terakhir, jumlah peserta purnawidya mengalami peningkatan signifikan, dari 1.321 peserta pada tahun 2020 menjadi 2.303 peserta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertanian semakin diminati dan berhasil menjangkau lebih banyak SDM pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi dengan peserta terbanyak antara lain Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur, yang sekaligus menjadi indikator aktifnya lembaga pelatihan di daerah tersebut.

b. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan standar nasional. Sepanjang tahun 2024, terdapat 1.148 peserta yang mengikuti uji sertifikasi, dan 1.117 orang (97,3%) dinyatakan



kompeten. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang diberikan telah terstandarisasi dan berorientasi pada kebutuhan riil dunia kerja pertanian.



Gambar 13. Perkembangan Sertifikasi Kompetensi 2020-2024

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, jumlah peserta sertifikasi meningkat dari 873 orang menjadi 1.148 orang, dengan tingkat kelulusan konsisten di atas 96%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan integrasi sistem pelatihan dengan skema sertifikasi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dukungan dari asesor kompetensi yang telah tersebar di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

c. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Kelembagaan P4S menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam menjalankan fungsi pelatihan berbasis masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat 349 P4S aktif dengan total peserta pelatihan mencapai 11.982 orang, terdiri dari 7.127 laki-laki dan 4.855 perempuan. Materi pelatihan yang disampaikan mencakup budidaya tanaman, peternakan, pengolahan hasil, dan kewirausahaan pertanian.



Gambar 14. P4S Petani Muda Keren Bali

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 5.601 peserta, maka jumlah peserta tahun 2024 mengalami lebih dari dua kali lipat peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa P4S telah menjadi simpul penting dalam penguatan kapasitas petani dan regenerasi pelaku utama di sektor pertanian. Peran P4S semakin vital dalam menjembatani program-program pemerintah dengan kebutuhan riil di tingkat desa.

Sumber: Buku Statistik Pelatihan Pertanian 2024

d. Peningkatan Kompetensi Widya Iswara

Widya Iswara sebagai aktor utama dalam penyampaian materi pelatihan juga menjadi sasaran pengembangan kapasitas. Tahun 2024 mencatat 162 widya iswara mengikuti program peningkatan kompetensi, dengan proporsi 86 laki-laki dan 76 perempuan. Peningkatan kapasitas difokuskan pada pembelajaran digital, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, dan penguatan metodologi pelatihan partisipatif.

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah widya iswara yang terlibat dalam pengembangan kompetensi meningkat dari 103 orang menjadi 162 orang. Kenaikan ini selaras dengan kebijakan modernisasi sistem pelatihan pertanian dan tuntutan terhadap metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

Sumber: Buku Statistik Pelatihan Pertanian 2024

e. Magang Luar Negeri

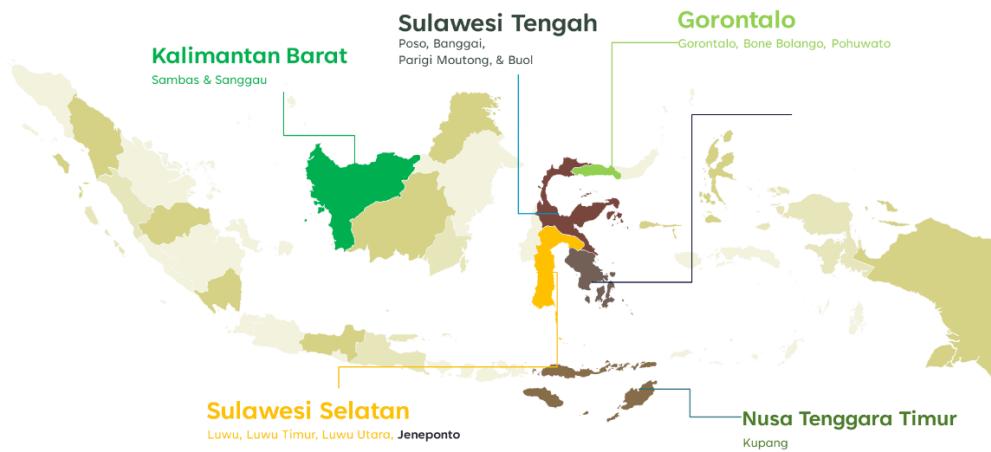
Magang luar negeri merupakan salah satu bentuk penguatan kapasitas SDM pertanian melalui pembelajaran langsung di negara maju. Pada tahun 2024, program ini mengirimkan 134 peserta ke Jepang, terdiri dari 109 laki-laki dan 25 perempuan, bekerja sama dengan *Japan Agricultural Exchange Council* (JAEC). Peserta mendapatkan pembelajaran tentang budidaya hortikultura, peternakan modern, manajemen usaha tani, dan konservasi lingkungan.

Tren selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah peserta dari 103 orang pada 2020 menjadi 134 orang pada 2024. Stabilitas jumlah peserta magang menunjukkan keberlangsungan kerja sama bilateral serta tingginya minat generasi muda untuk belajar langsung dari praktik pertanian di luar negeri. Alumni program ini diharapkan menjadi katalis dalam penyebarluasan teknologi tepat guna dan inovasi pertanian di daerah asal mereka.

Sumber: Buku Statistik Pelatihan Pertanian 2024

f. Program READSI

Selama periode 2018–2025, Program READSI menunjukkan capaian signifikan dalam peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan di 6 provinsi dan 18 kabupaten melalui pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan langsung oleh fasilitator desa serta penyuluhan pertanian. Program ini menjangkau 68.400 rumah tangga atau sekitar 342.000 penerima manfaat langsung di 342 desa, dengan melibatkan lebih dari 3.800 kelompok tani sebagai pelaksana utama intervensi, yang menegaskan efektivitas pendekatan kolektif dan partisipatif.



Gambar 15. Lokasi Project READSI 2018-2024

Pada Komponen 1 (peningkatan kapasitas petani dan pengembangan mata pencaharian), sebanyak 32.226 petani mengikuti pelatihan praktik teknologi produksi sesuai komoditas unggulan lokal, dengan tingkat adopsi inovasi mencapai 72% rumah tangga penerima manfaat. Produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung, dan kakao meningkat 20–30% dibandingkan baseline. Dari sisi inklusi keuangan, 17.372 petani memperoleh pelatihan literasi keuangan dan mulai mengakses layanan keuangan formal, sementara 11.343 rumah tangga mendapatkan edukasi gizi untuk memperbaiki konsumsi pangan dan memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Dalam penguatan kelembagaan, 2.922 kelompok tani telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan 2.411 kelompok membentuk unit usaha bersama sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan peningkatan posisi tawar. Pada Komponen 2 (penguatan layanan penyuluhan dan agribisnis), program melatih 1.172 penyuluhan pertanian, memperkuat 421 petani kakao dalam aspek teknis dan manajerial rantai nilai, serta memfasilitasi 25.469 petani dalam akses sarana produksi dan alsintan. Program ini juga mendorong inklusivitas, dengan partisipasi perempuan mencapai sekitar 50% dari total penerima manfaat, termasuk dalam peran kepemimpinan kelompok tani. Secara keseluruhan, READSI berhasil mengintegrasikan peningkatan produktivitas, literasi keuangan, gizi keluarga, dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi model pemberdayaan pertanian yang replikatif bagi program pembangunan lainnya.

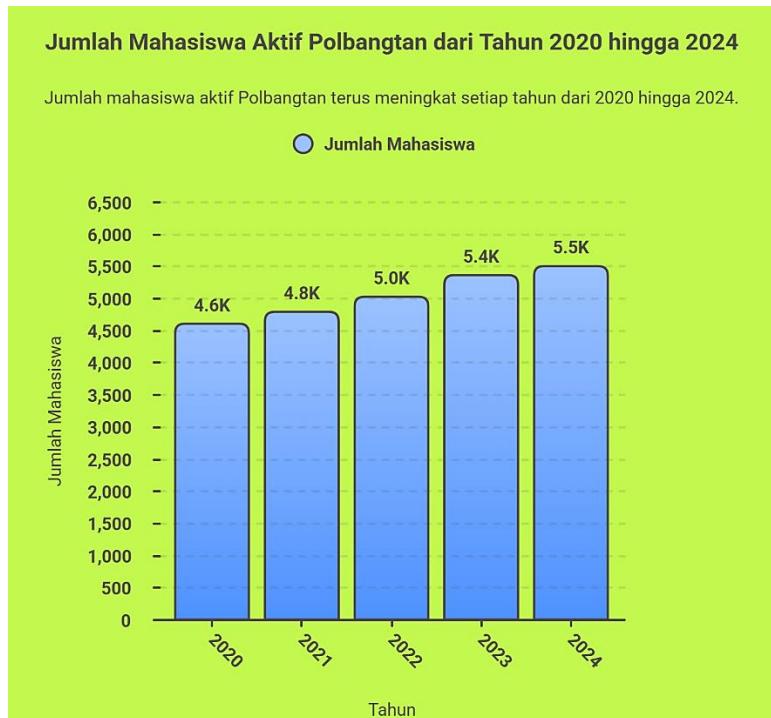
Sumber: Final Report Project READSI 2018-2024

4. Pendidikan Pertanian

a. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)

1) Mahasiswa Aktif

Selama periode 2020 hingga 2024, Polbangtan mencatat pertumbuhan jumlah mahasiswa aktif yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah mahasiswa aktif tercatat sebanyak 4.602 orang, yang kemudian meningkat menjadi 4.786 orang pada 2021, 5.022 orang pada 2022, 5.358 orang pada 2023, dan mencapai 5.498 orang pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Polbangtan semakin mampu menjangkau generasi muda di berbagai wilayah untuk mengakses pendidikan tinggi vokasional pertanian.



Gambar 16. Grafik Jumlah Mahasiswa Aktif Polbangtan Tahun 2020-2024

Peningkatan jumlah mahasiswa aktif di seluruh satuan pendidikan Polbangtan merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya tarik pendidikan vokasi. Hal ini ditunjang oleh pelaksanaan seleksi yang merata secara nasional, penerapan kurikulum berbasis praktik dan kewirausahaan, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Penerapan *Teaching Factory* dan model pembelajaran berbasis proyek juga turut berkontribusi dalam menjadikan Polbangtan sebagai institusi pendidikan yang relevan dengan dinamika pembangunan pertanian modern. Dari sisi demografi, mahasiswa yang masuk berasal dari berbagai latar belakang daerah, dengan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta didominasi oleh kelompok usia produktif 17–25 tahun.

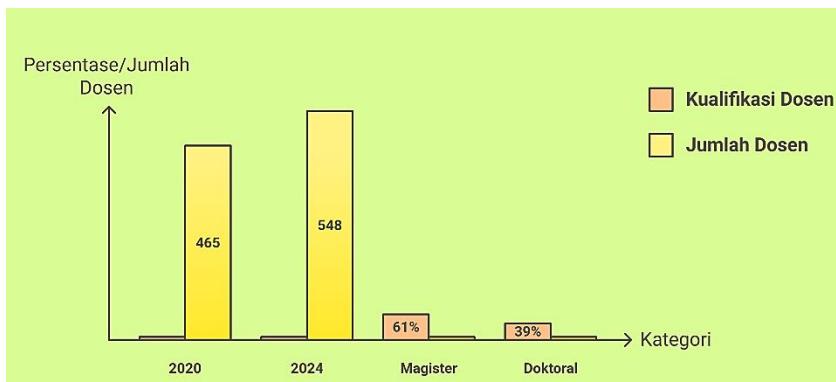
2) Alumni Mahasiswa

Jumlah lulusan Polbangtan dalam lima tahun terakhir mencerminkan tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2020, Polbangtan meluluskan 1.308 mahasiswa, kemudian meningkat menjadi 1.390 lulusan pada 2021, 1.491 lulusan pada 2022, 1.589 lulusan pada 2023, dan mencapai 1.624 lulusan pada tahun 2024. Lulusan ini tersebar di berbagai subsektor pertanian, baik sebagai tenaga profesional di instansi pemerintah, swasta, maupun sebagai wirausahawan muda pertanian.

Sebagian besar lulusan Polbangtan berhasil terserap dalam lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Berdasarkan data *tracer study*, proporsi alumni yang bekerja dalam waktu enam bulan setelah lulus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti program pelatihan lanjutan di dalam maupun luar negeri. Polbangtan juga terus mendorong alumni untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan pertanian melalui program pembinaan alumni dan jaringan kerja sama dengan stakeholder pertanian, termasuk dalam mendukung program petani milenial dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

3) Dosen

Jumlah dosen yang aktif mengajar di lingkungan Polbangtan mengalami peningkatan dari 465 orang pada tahun 2020 menjadi 548 orang pada 2024. Peningkatan ini mencakup dosen tetap, dosen tidak tetap, serta dosen praktisi dari dunia industri dan lembaga mitra. Dari sisi kualifikasi, sekitar 61% dosen telah memiliki gelar magister (S2), dan 39% telah menempuh pendidikan doktoral (S3).



Gambar 17. Grafik Distribusi dan Kualifikasi Dosen di Polbangtan Tahun 2020-2024

Distribusi dosen mencerminkan komitmen dalam memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa yang ideal serta menjaga mutu proses pembelajaran. Selain penguatan jumlah, kualitas dosen juga ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi, pelatihan pedagogi vokasional, serta fasilitasi studi lanjut. Polbangtan juga aktif menjalin kolaborasi tridharma perguruan tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Hal ini mendukung pengembangan kurikulum yang adaptif, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta selaras dengan arah pembangunan pertanian nasional.

4) Mahasiswa Aktif Kerjasama Luar Negeri

Polbangtan secara bertahap memperluas jangkauan program internasionalisasi dengan menjalin kerja sama luar negeri di bidang pendidikan vokasi. Hingga tahun 2024, tercatat terdapat 113 mahasiswa aktif yang mengikuti program kerja sama internasional, baik dalam bentuk double degree, pertukaran pelajar, program beasiswa luar negeri, maupun kegiatan *short course* bersama institusi mitra dari Asia Tenggara dan Timur. Salah satu bentuk nyata program ini adalah kerja sama dengan Timor Leste yang mengirimkan mahasiswa untuk belajar di PEPI Serpong sejak 2023.

Partisipasi mahasiswa dalam program internasional menjadi bagian dari strategi Polbangtan dalam menyiapkan lulusan yang berdaya saing global. Program ini juga mencerminkan kemampuan Polbangtan dalam memenuhi standar mutu internasional serta kesiapan institusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan berbasis kolaborasi. Mahasiswa peserta program ini difasilitasi tempat tinggal di asrama dan mendapatkan pembinaan akademik tambahan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi Polbangtan sebagai *Center of Excellence* dalam pendidikan vokasi pertanian di kawasan regional.

5) Akreditasi

Capaian akreditasi merupakan cerminan kualitas dan tata kelola lembaga pendidikan yang memenuhi standar nasional. Hingga akhir 2024, seluruh Polbangtan telah memperoleh status akreditasi institusi, dan seluruh program studi dinyatakan

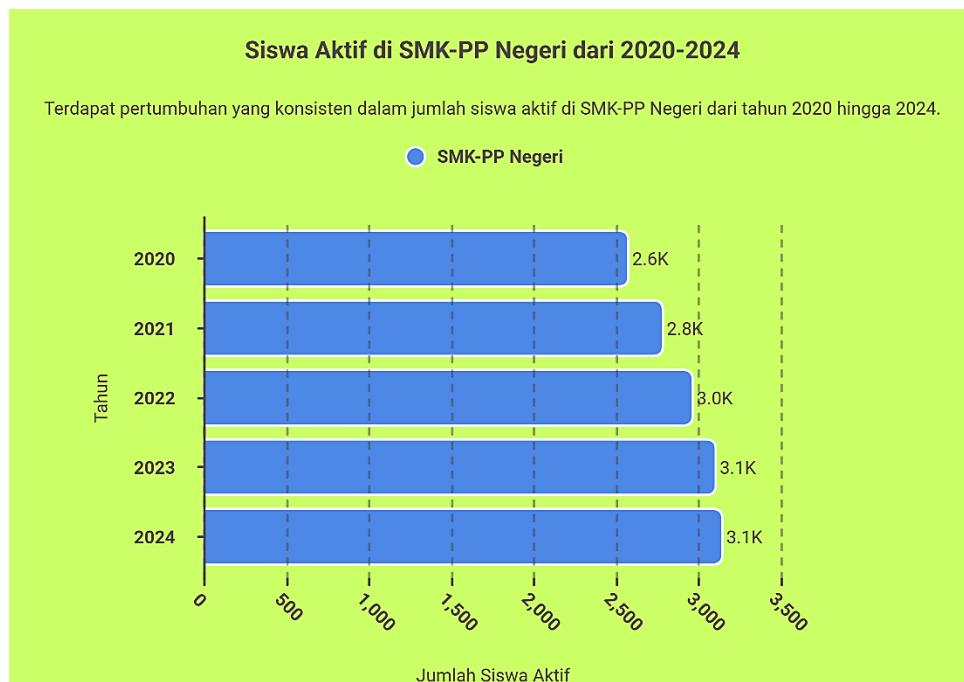
terakreditasi oleh LAM dan BAN-PT. Sebagian besar program studi telah memperoleh peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul”, menunjukkan adanya peningkatan mutu secara konsisten dalam hal kurikulum, SDM, sarana prasarana, serta capaian lulusan.

Akkreditasi menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal yang mendorong Polbangtan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Proses reakkreditasi secara berkala juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi vokasi. Upaya ini diiringi dengan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara sistematis oleh Unit Penjaminan Mutu di setiap kampus. Akkreditasi yang baik tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik dan daya saing lulusan, tetapi juga membuka peluang kemitraan internasional dan akses ke program hibah pendidikan nasional.

b. SMK Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PP Negeri)

1) Siswa Aktif

Jumlah siswa aktif di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PP Negeri) mengalami pertumbuhan konsisten sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.574 siswa aktif, kemudian meningkat menjadi 2.783 siswa pada 2021, 2.964 siswa pada 2022, 3.104 siswa pada 2023, dan mencapai 3.144 siswa pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan daya tarik pendidikan menengah vokasi pertanian, serta keberhasilan strategi rekrutmen yang memperluas akses pendidikan ke wilayah-wilayah non-perkotaan.



Gambar 18. Grafik Siswa Aktif SMK-PP Negeri Tahun 2020-2024

Jumlah siswa yang terus meningkat mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran SMK-PP Negeri dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keahlian terapan. Para siswa dididik dalam berbagai kompetensi keahlian seperti Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Perkebunan, Peternakan, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, hingga Perawatan Kesehatan Hewan. Kurikulum yang digunakan berbasis Kurikulum 2013 dengan pendekatan *teaching factory* dan proyek



nyata berbasis potensi lokal, serta dukungan praktik kerja lapangan. Secara demografi, mayoritas siswa berasal dari pedesaan dan memiliki latar belakang keluarga petani, menjadikan SMK-PP sebagai alat penting dalam regenerasi pelaku utama sektor pertanian.

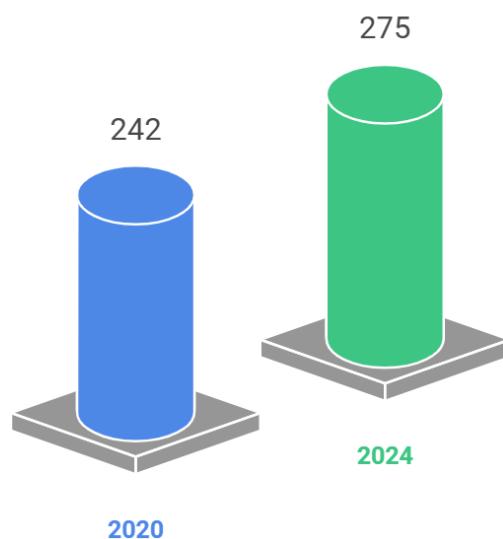
2) Alumni SMK-PP Negeri

Meskipun data alumni per tahun tidak ditemukan secara lengkap, pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah alumni lulusan SMK-PP Negeri mencapai 996 orang. Tren ini diperkirakan mengalami peningkatan sejak 2020, yang ketika itu jumlahnya berada di kisaran 879 lulusan. Alumni SMK-PP banyak terserap di sektor pertanian rakyat maupun perusahaan perkebunan dan peternakan, serta sebagian lainnya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi seperti Polbangtan.

Berdasarkan hasil penelusuran alumni (*tracer study*), sebagian besar lulusan SMK-PP Negeri mampu terserap dalam dunia kerja dalam waktu enam bulan setelah kelulusan. Hal ini menjadi indikator efektivitas kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan *teaching factory*. Tidak sedikit pula alumni yang memanfaatkan keterampilan kewirausahaan yang diperoleh selama masa pendidikan untuk membuka usaha tani mandiri, termasuk dalam skema program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Lulusan SMK-PP Negeri juga menjadi salah satu target utama dalam program Petani Milenial, mengingat karakter mereka yang adaptif terhadap teknologi serta memiliki pengalaman teknis langsung.

3) Guru

Jumlah guru SMK-PP Negeri juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan siswa. Tercatat pada tahun 2024 terdapat 275 guru, naik dari sekitar 242 guru pada tahun 2020. Komposisi ini terdiri dari guru PNS, honorer, dan tenaga pengajar praktisi, yang tersebar di SMK-PP Negeri Sembawa, Banjarbaru, dan Kupang.



Gambar 19. Grafik Pertumbuhan Jumlah Guru di SMK-PP Negeri Tahun 2020-2024

Ketersediaan guru yang memadai sangat penting dalam menjamin mutu pendidikan. Mayoritas guru memiliki latar belakang pendidikan pertanian dan pelatihan pedagogik vokasional, serta secara berkala mendapatkan pembinaan kompetensi teknis dan metodologis. Sejumlah guru juga telah terlibat dalam kerja sama dengan dunia

industri, lembaga riset, serta program inkubasi bisnis yang terintegrasi dengan kegiatan siswa. Peningkatan jumlah dan kualitas guru ini turut memperkuat posisi SMK-PP sebagai penyedia tenaga kerja terampil di sektor pertanian nasional.

4) Akreditasi

Capaian akreditasi SMK-PP Negeri hingga tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Seluruh satuan pendidikan SMK-PP telah memperoleh status akreditasi institusi, dengan mayoritas program keahlian terakreditasi minimal “Baik” dan sebagian telah mencapai “Baik Sekali”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi standar nasional dalam aspek kurikulum, manajemen, sarana prasarana, serta kinerja lulusan.

Akreditasi menjadi bukti komitmen SMK-PP Negeri dalam menjaga mutu pendidikan, serta menjadi syarat penting untuk memperoleh dukungan program pemerintah dan kemitraan dunia usaha. Proses peningkatan peringkat akreditasi secara berkelanjutan terus didorong melalui evaluasi internal dan eksternal, pelatihan manajemen sekolah, serta pelibatan *stakeholders* dalam perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan akreditasi yang memadai, SMK-PP Negeri semakin siap menjadi institusi pendidikan vokasi menengah pertanian yang relevan dan unggul.

c. Tugas Belajar

1) Program Magister (S2)

Selama periode 2020–2024, program Tugas Belajar jenjang Magister menunjukkan konsistensi dalam memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kapasitas akademik dan profesional mereka. Jumlah peserta tugas belajar S2 tercatat sekitar 33 orang pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 45 orang pada 2021, 47 orang pada 2022, 45 orang pada 2023, dan 47 orang pada 2024, sehingga total peserta selama lima tahun mencapai 217 orang. Peningkatan ini mencerminkan dukungan kelembagaan terhadap pengembangan SDM pertanian yang berorientasi pada kualitas dan kompetensi yang relevan dengan tantangan pembangunan sektor pertanian modern.

Program ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang mendukung sektor pertanian, mulai dari manajemen agribisnis, teknologi pertanian, penyuluhan, hingga kebijakan publik. Para peserta diarahkan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki reputasi baik di bidangnya. Selain pembelajaran akademis, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terapan yang hasilnya dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program Kementerian Pertanian. Dukungan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan S2 yang mampu berperan sebagai pengambil keputusan, perencana, dan inovator di unit kerja masing-masing.

2) Program Doktor (S3)

Program Tugas Belajar jenjang Doktor juga menjadi prioritas dalam membangun kapasitas SDM pertanian yang memiliki keahlian strategis dan mendalam di bidangnya. Sepanjang 2020–2024, jumlah peserta S3 tercatat sebanyak 9 orang pada 2020, 13 orang pada 2021, 15 orang pada 2022, 12 orang pada 2023, dan 10 orang pada 2024, dengan total 59 orang dalam lima tahun. Fokus utama dari program ini adalah melahirkan pakar-pakar pertanian yang mampu menghasilkan kajian ilmiah dan

rekомендasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.

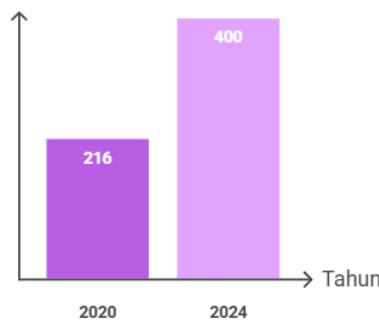


Gambar 20. Grafik Peserta Program Tugas Belajar S3 Tahun 2020-2024

Peserta tugas belajar S3 diarahkan untuk menempuh studi di bidang-bidang strategis seperti bioteknologi pertanian, pemuliaan tanaman, manajemen sumber daya alam, serta kebijakan pangan. Penelitian yang dilakukan oleh peserta tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis di lapangan, seperti peningkatan efisiensi produksi, mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan pasar pertanian. Melalui program ini, diharapkan terbentuk jejaring akademik dan profesional yang mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah pertanian global.

d. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP)

Program PWMP merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Pertanian yang dirancang untuk mencetak generasi muda sebagai pelaku usaha agribisnis yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam kurun waktu 2020–2024, jumlah kelompok PWMP yang berhasil dibentuk mencapai 1.540 kelompok, meningkat signifikan dari 216 kelompok pada tahun 2020 menjadi 400 kelompok pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pembinaan yang menggabungkan pelatihan teknis, manajemen usaha, pendampingan lapangan, dan fasilitasi akses permodalan.



Gambar 21. Grafik Peningkatan Pembentukan Kelompok PWMP Tahun 2020-2024

Setiap kelompok PWMP biasanya terdiri dari lulusan atau mahasiswa tingkat akhir Polbangtan dan SMK-PP Negeri, yang dibekali dengan modal awal usaha, bimbingan teknis, serta pendampingan bisnis secara intensif selama periode inkubasi. Subsektor usaha yang dikembangkan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

peternakan, hingga pengolahan hasil pertanian. Program ini juga mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dirintis oleh peserta PWMP. Keberhasilan program ini terlihat dari banyaknya alumni yang berhasil mengembangkan usahanya secara mandiri, memperluas lapangan kerja, dan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk pertanian di wilayahnya.

e. Petani Milenial

Program Petani Milenial menjadi pilar penting dalam agenda regenerasi petani dan modernisasi pertanian nasional. Sepanjang 2020–2024, Kementerian Pertanian berhasil memfasilitasi terbentuknya 168.948 petani milenial di berbagai provinsi. Sasaran program ini adalah individu berusia 19–39 tahun yang memiliki minat tinggi di bidang pertanian dan bersedia mengadopsi teknologi pertanian modern, mengembangkan usaha tani, serta memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan manajemen usaha.

Implementasi program dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pelatihan teknis berbasis komoditas unggulan, fasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya, serta pendampingan usaha melalui jejaring mentor profesional. Selain itu, program ini terintegrasi dengan inisiatif lain seperti PWMP dan Teaching Factory, sehingga peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola usaha pertanian dari hulu hingga hilir. Hasilnya, banyak petani milenial yang tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga menjadi agen perubahan di komunitasnya, mendorong adopsi inovasi, dan memperluas pasar produk pertanian ke level nasional bahkan ekspor.

f. Program YESS

Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS) merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan dukungan pinjaman dan hibah dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD). Sebagai *Executing Agency*, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bertanggung jawab penuh atas implementasi program, dengan dukungan lembaga pendidikan vokasi (Polbangtan dan SMK-PP) sebagai *Project Provincial Implementation Unit* (PPIU) di empat provinsi.

Program ini dilaksanakan sejak 17 Juni 2019 hingga 31 Desember 2025, dengan tanggal penyelesaian kegiatan pada 30 Juni 2025. Lokasi pelaksanaannya meliputi 19 kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Bogor), Jawa Timur (Malang, Pacitan, Pasuruan, Tulungagung, Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan), dan Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bone, Bulukumba, Maros, Gowa).

Secara umum, tujuan program adalah menumbuhkan petani dan wirausahawan muda serta meningkatkan jumlah pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Upaya ini ditempuh melalui penguatan lembaga pendidikan vokasi dan inkubator bisnis, fasilitasi kewirausahaan, dukungan akses keuangan, pelatihan aparatur dan non-aparatur, program pemagangan, serta penciptaan lingkungan pendukung yang kondusif bagi transformasi pertanian pedesaan.

Selama kurun waktu 2019–2025, Program YESS telah menunjukkan capaian yang melampaui target. Program ini berhasil menjangkau 315.357 penerima manfaat atau 143% dari target, dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan yang seimbang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 198 ribu pemuda pedesaan mendapat manfaat nyata berupa pelatihan manajemen bisnis, literasi keuangan, hibah kompetitif, dan pemagangan.

Dampak nyata program terlihat dari kontribusi pada ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Hingga pertengahan 2025, sebanyak 11.436 pemuda lulusan pendidikan vokasi dan pemagangan telah bekerja atau berwirausaha di sektor pertanian, sementara 46 ribu wirausaha pedesaan melaporkan peningkatan keuntungan usahanya. Program ini juga mendorong penciptaan lebih dari 102 ribu lapangan kerja baru, jauh melampaui target awal, serta membuka akses keuangan dengan melibatkan 81 ribu pemuda pengguna produk tabungan dan 20 ribu pemuda pengguna layanan pembiayaan.

Selain itu, program memberikan hibah kompetitif senilai Rp117,73 miliar kepada hampir 4 ribu penerima manfaat dari berbagai skema, termasuk individu, klaster, santri tani, pekerja migran, serta kelompok adat dan disabilitas. Program YESS juga memastikan inklusi dengan melibatkan 941 penyandang disabilitas serta menjangkau sejumlah komunitas adat di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Dari sisi peningkatan kapasitas, program telah menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, mulai dari motivasi bisnis, startup, hingga advance training dan smart farming. Total peserta pelatihan manajemen bisnis mencapai 142.997 orang, sedangkan pelatihan literasi keuangan diikuti oleh 94.492 pemuda baik melalui community base maupun platform LMS. Hal ini memperlihatkan bahwa YESS tidak hanya menumbuhkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kecakapan manajerial dan literasi finansial generasi muda pertanian.

Sebagai legacy, YESS menghasilkan 23 publikasi knowledge management, mencakup kisah sukses petani muda dari 19 kabupaten, praktik terbaik, serta buku A to Z Program YESS. Dokumentasi ini tidak hanya merekam keberhasilan, tetapi juga memberikan inspirasi dan panduan bagi pengembangan program serupa di masa depan. Dengan adanya publikasi ini, praktik baik yang telah terbukti di lapangan dapat direplikasi lebih luas, sekaligus memperkuat komitmen terhadap regenerasi petani.

Secara keseluruhan, capaian Program YESS membuktikan kontribusi nyata terhadap regenerasi petani, penciptaan ekosistem kewirausahaan muda di pedesaan, dan percepatan transformasi pertanian Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada perubahan cara pandang pemuda terhadap sektor pertanian sebagai bidang usaha yang menjanjikan, modern, dan berkelanjutan.

Tabel 2. Capaian Program YESS Tahun 2019-2025

No	Indikator Capaian	Target Program	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
1	Jumlah penerima manfaat	220.000 orang	315.357 orang	143%	Laki-laki dan perempuan seimbang
2	Pemuda memperoleh manfaat langsung (pelatihan, hibah, pemagangan)	–	198.000+ orang	–	Pemuda pedesaan
3	Pemuda bekerja/berwirausaha di sektor pertanian	–	11.436 orang	–	Lulusan vokasi dan pemagangan
4	Wirausaha pedesaan meningkat keuntungan	–	46.000 orang	–	Meningkatkan pendapatan
5	Lapangan kerja baru tercipta	32.000 orang	102.000+ orang	>300%	Melampaui target
6	Pemuda pengguna produk tabungan	–	81.000 orang	–	Inklusi keuangan
7	Pemuda pengguna layanan pembiayaan	–	20.000 orang	–	Akses modal usaha
8	Penerima hibah kompetitif	–	±4.000 orang	–	Multi-skema
9	Nilai hibah kompetitif	–	Rp117,73 miliar	–	Individu, klaster, santri tani, PMI, adat, disabilitas
10	Peserta pelatihan manajemen bisnis	–	142.997 orang	–	Community & LMS
11	Peserta pelatihan literasi keuangan	–	94.492 orang	–	Community & LMS
12	Penerima manfaat disabilitas	–	941 orang	–	Inklusi sosial
13	Publikasi <i>knowledge management</i>	–	23 publikasi	–	<i>Legacy program</i>

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

1. Visi Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian merepresentasikan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode 2029. Perumusan visi menggambarkan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Pertanian 2025–2029 adalah:

“PERTANIAN MAJU BERKELANJUTAN SERTA BERMANFAAT BAGI RAKYAT INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat diartikan bahwa pembangunan sektor pertanian haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaat diberikan dengan penyelenggaraan pertanian secara berkelanjutan. Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci, meliputi: pertanian, pertanian maju, pertanian berkelanjutan dan pertanian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pertanian

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pertanian Maju

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diterima masyarakat sebagai berikut:

- 1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.

- 2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
- 4) Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2. Misi Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi Kementerian Pertanian, dirumuskan misi Kementerian Pertanian 5 (lima) 2025 – 2029 yang meliputi:

a. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah monkeypox (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

e. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik.

Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

Berdasarkan kelima misi tersebut, dirumuskan Tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan, yaitu pertumbuhan volume usaha pertanian dan pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas.
- b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budi daya pertanian, dan indeks cadangan asal pertanian nasional.
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur dengan indikator tujuan persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energy, pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian, dan persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian.
- d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia yang diukur dengan indikator tujuan persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
- e. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029

1. Visi BPPSDMP

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.”

Berdasarkan visi Badan PPSDMP 2025 – 2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan *positioning* SDM pertanian sebagai *human capital* untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai *human capital* merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi namun sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

a. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.



b. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

c. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

d. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan SDM yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

- **Inklusif**, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- **Profesional**, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- **Modern**, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

2. MISI BADAN PPSDMP 2025 - 2029

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

a. Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM

pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani. Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. TUJUAN BADAN PPSDMP 2025 - 2029

Tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Perumusan tujuan ini menerjemahkan misi ke dalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi organisasi pada periode 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, dirumuskan tiga tujuan BPPSDMP sebagai berikut.

a. Tujuan 1

Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa, yang diukur melalui indikator *Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa*. Target indikator ini ditetapkan sebesar **22,03 persen pada tahun 2025** dan meningkat secara bertahap hingga **22,43 persen pada tahun 2029**.

b. Tujuan 2

Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani, yang diukur melalui indikator *Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas*. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas ditetapkan sebesar **1 persen per tahun** selama periode **2025–2029**.

c. Tujuan 3

Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional, yang diukur melalui indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:

1. *Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor*, dengan target **88,5 persen pada tahun 2025** meningkat menjadi **89,5 persen pada tahun 2029**;
2. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)* BPPSDMP, dengan target **90,00 pada tahun 2025** meningkat menjadi **91,00 pada tahun 2029**;
3. *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* terhadap layanan BPPSDMP, dengan target **3,60 pada tahun 2025** meningkat menjadi **3,64 pada tahun 2029**.

C. Sasaran Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Perumusan Sasaran Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dilakukan melalui penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

Kontribusi BPPSDMP terhadap pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan ke dalam Sasaran Program “**Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani**.” Sasaran ini merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya pendukung lainnya, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dimaknai sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja, dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirausahaan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

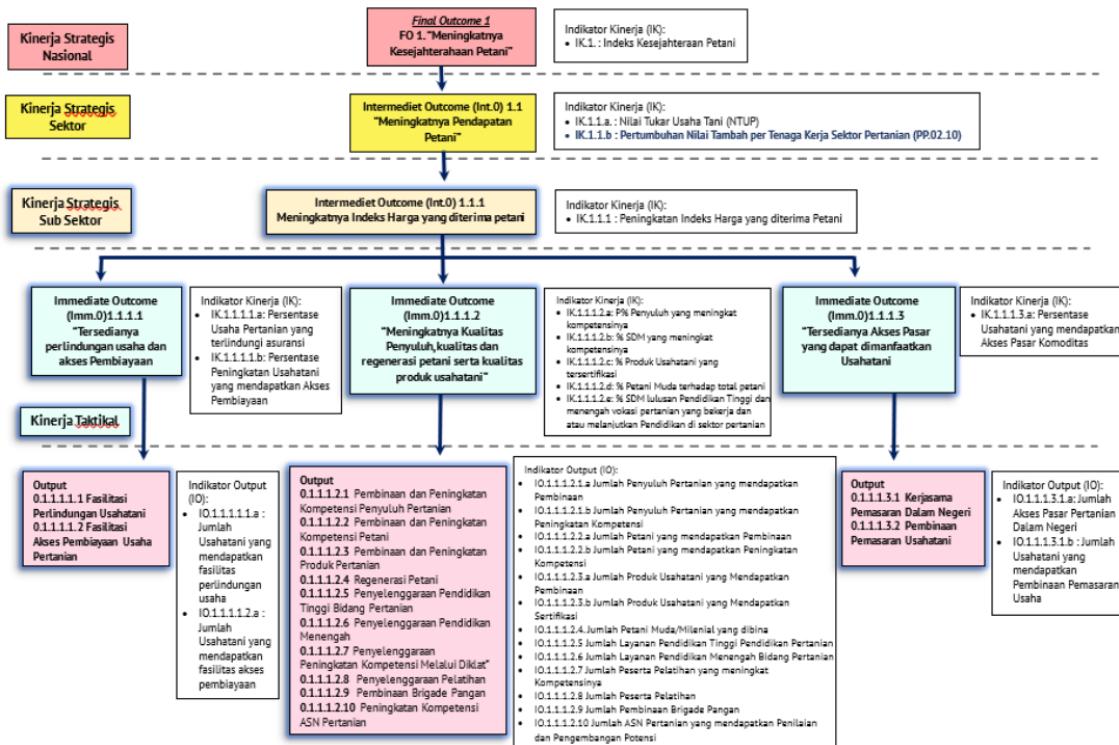
D. Pohon Kinerja BPPSDMP

Pohon kinerja merupakan instrumen strategis untuk memastikan keterkaitan logis antara sasaran pembangunan nasional, kebijakan Kementerian Pertanian, hingga capaian kinerja unit kerja di lingkup BPPSDMP. Sesuai PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021, pohon kinerja disusun dengan pendekatan sebab–akibat (*causal logic*) yang menggambarkan hubungan berjenjang antara *outcome*, *intermediate outcome*, *immediate outcome*, hingga *output* sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.



Gambar 22. Summary Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029, terdapat lima final *outcome* pembangunan sektor pertanian. Dari kelima *outcome* tersebut, BPPSDMP secara langsung berkontribusi pada **Final Outcome 1, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani**. Kontribusi ini menempatkan BPPSDMP sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian *outcome* sektor pertanian lainnya.



Gambar 23. Kontribusi Badan PPSDMP Pada Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Sebagaimana tergambar dalam pohon kinerja, peningkatan kesejahteraan petani dicapai melalui **Intermediate Outcome sektor berupa meningkatnya pendapatan petani**, yang diukur antara lain melalui Nilai Tukar Usaha Tani (NTUP) dan pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian. Intermediate outcome tersebut selanjutnya diturunkan pada level subsektor menjadi **meningkatnya indeks harga yang diterima petani**, sebagai refleksi langsung dari perbaikan posisi ekonomi petani dalam sistem usaha tani dan pasar.

Pada level yang lebih operasional, pohon kinerja menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan harga yang diterima petani dipengaruhi oleh beberapa **Immediate Outcome utama**, yaitu:



1. tersedianya perlindungan usaha dan akses pembiayaan;
2. meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian dan kapasitas regenerasi petani;
3. tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tani.

BPPSDMP berperan langsung dalam pencapaian immediate outcome tersebut melalui pelaksanaan berbagai **output pembangunan SDM pertanian**, meliputi pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluhan pertanian, penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian melalui Polbangtan dan SMK-PP, pelatihan dan pendidikan nonformal, regenerasi petani, serta pembinaan Brigade Pangan. Output-output ini dirancang untuk memperkuat kapasitas petani dan penyuluhan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas usaha tani.

Dengan struktur tersebut, kontribusi BPPSDMP dalam pohon kinerja Kementerian Pertanian bersifat **langsung, terukur, dan kausal**, di mana penguatan kapasitas SDM pertanian menjadi instrumen utama untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pohon kinerja BPPSDMP dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai peta jalan transformasi SDM pertanian yang terintegrasi dan berorientasi hasil dalam mendukung target pembangunan pertanian periode 2025–2029.

E. Manajemen Risiko Pembangunan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Dalam konteks Renstra Badan PPSDMP Tahun 2025–2029, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, adaptif, serta berkelanjutan di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Tujuan penerapan manajemen risiko adalah:

1. Mengantisipasi potensi kegagalan pencapaian sasaran strategis BPPSDMP.
2. Meminimalkan dampak negatif yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko.
4. Memastikan keberlanjutan program pembangunan SDM pertanian.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, sasaran, serta arah kebijakan BPPSDMP, risiko pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Risiko SDM dan Regenerasi Petani
 - a) Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
 - b) Keterbatasan kompetensi aparatur dan non-aparatur dalam adopsi teknologi modern.
 - c) Ketimpangan kualitas SDM antarwilayah.
2. Risiko Kelembagaan dan Tata Kelola
 - a) Ketidaksinkronan program penyuluhan pusat dan daerah.
 - b) Keterbatasan kapasitas kelembagaan penyuluhan di daerah.
 - c) Lemahnya implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
3. Risiko Adopsi Teknologi dan Pertanian Modern

- a) Rendahnya pemanfaatan teknologi pertanian 4.0.
 - b) Keterbatasan literasi digital pelaku utama dan pelaku usaha.
 - c) Kesenjangan infrastruktur teknologi informasi di wilayah perdesaan.
4. Risiko Pembiayaan dan Kemitraan
- a) Rendahnya minat lembaga keuangan dan mitra usaha dalam bermitra dengan petani kecil.
 - b) Ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah.
5. Risiko Sosial dan Persepsi Publik
- a) Persepsi negatif masyarakat terhadap sektor pertanian.
 - b) Rendahnya daya tarik sektor pertanian sebagai pilihan karier.

Tabel 2. Manajemen Risiko Pembangunan SDM Pertanian

No	Risiko Strategis	Dampak terhadap Sasaran	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Rendahnya minat petani muda	Gagalnya peningkatan petani milenial (IT.1)	Tinggi	Penguatan program YESS lanjutan, kampanye pertanian modern, inkubasi bisnis pemuda
2	Kesenjangan kompetensi SDM	Terhambatnya kenaikan kelas usaha tani (IT.2)	Tinggi	Pelatihan berjenjang, sertifikasi kompetensi, LMS nasional
3	Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah	Rendahnya efektivitas penyuluhan	Sedang	Sinkronisasi perencanaan, forum koordinasi penyuluhan
4	Rendahnya adopsi teknologi	Produktivitas rendah	Tinggi	<i>Smart farming, demonstration plot, digital extension</i>
5	Keterbatasan pembiayaan	Terhambatnya pengembangan usaha	Sedang	Kemitraan perbankan, KUR, pembiayaan inklusif
6	Persepsi negatif sektor pertanian	Rendahnya regenerasi petani	Sedang	<i>Branding</i> pertanian, <i>role model</i> petani muda

Berdasarkan risiko strategis yang mungkin muncul, maka dapat dilakukan pengendalian risiko melalui beberapa upaya, sebagai berikut:

1. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan penganggaran BPPSDMP.
2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap indikator tujuan (IT.1–IT.5).
3. Pelaporan kinerja berbasis risiko.
4. Penguatan peran pimpinan unit kerja dalam *early warning system* risiko strategis.

Penerapan manajemen risiko pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian merupakan fondasi penting dalam memastikan tercapainya sasaran strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis risiko, BPPSDMP diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan pertanian, memperkuat daya saing SDM pertanian, serta menjamin keberlanjutan program menuju terwujudnya Pertanian Maju Berkelaanjutan dan Indonesia Emas 2045.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Pada periode 2025–2029, arah kebijakan Kementerian Pertanian diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pencapaian swasembada pangan diarahkan melalui implementasi Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama melalui intervensi hulu–hilir, antara lain cetak sawah dan perluasan areal tanam, optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi susu dan daging nasional. Proyek strategis nasional di bidang pertanian menjadi bagian integral dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Sejalan dengan agenda hilirisasi nasional, kebijakan pertanian juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui penguatan agroindustri berbasis wilayah. Komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu didorong masuk ke rantai pasok industri melalui penguatan pascapanen, fasilitasi investasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, strategi peningkatan produksi protein hewani ditempuh melalui pengembangan subsektor peternakan, termasuk pembibitan, peningkatan populasi ternak, dan investasi peternakan berkelanjutan. Upaya tersebut dilengkapi dengan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dalam rangka penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, Kementerian Pertanian mendukung transisi energi nasional melalui percepatan program mandiri energi berbasis biodiesel dengan peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menstabilkan harga komoditas sawit, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Secara keseluruhan, strategi terintegrasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.



Gambar 24. Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 25. Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dituangkan dalam **Rumah Strategi Kementerian Pertanian** sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Rumah strategi tersebut menggambarkan keterkaitan yang utuh antara visi, tujuan antara, pilar pembangunan, dan fondasi pendukung yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Kementerian Pertanian menetapkan **lima tujuan antara** yang ingin dicapai, yaitu:

1. pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. kemandirian pangan asal pertanian;
3. pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
5. terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Pencapaian kelima tujuan antara tersebut mensyaratkan ditegakkannya **delapan pilar utama pembangunan pertanian** secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
4. pemanfaatan dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
5. perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. pengawasan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. regenerasi petani serta pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Agar pilar-pilar pembangunan pertanian tersebut dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan **fondasi yang kokoh dan saling mendukung**. Oleh karena itu, pembangunan pertanian nasional periode 2025–2029 ditopang oleh **lima fondasi utama**, yaitu:

1. sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif dan berdaya saing;
2. reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif;
3. standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian sebagai penjamin mutu dan daya saing;
4. pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh tahapan usaha tani, mulai dari budidaya hingga pascapanen; dan
5. penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*, serta praktik baik lainnya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada dua pokok utama. Pertama, peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia, yang dioperasionalisasikan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai penguatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia pertanian pada periode 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja, tetapi terutama pada peningkatan kualitas melalui penguatan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluhan pertanian diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan di tingkat lapangan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Pada periode 2025–2029, BPPSDMP berperan strategis sebagai penggerak utama regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia secara berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan Badan PPSDMP untuk memfasilitasi dan mendorong eksekusi strategi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati. Dukungan regulasi memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan setiap inisiatif dan aktivitas yang diselenggarakan Badan PPSDMP 5 (lima) tahun kedepan. Secara garis besar, terdapat beberapa kebutuhan regulasi Badan PPSDMP 2025 – 2029. Kebutuhan regulasi tersebut dipetakan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kerangka Regulasi UU dan Perpres
 - a. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
 - b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan).
2. Kerangka Regulasi Permentan
 - a. Klaster Pelatihan

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).
- 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluhan Pertanian.
- b. Klaster Penyuluhan
 - 1) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 - 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
 - 3) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - 4) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.
 - 5) Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian.
 - 6) Rancangan Perubahan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Penyuluhan Pertanian Swasta.
 - 7) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Penyuluhan Pertanian Teladan.
 - 8) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Penyuluhan Pertanian Swadaya Teladan.
 - 9) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi.
 - 10) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi.
 - 11) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian.
- c. Klaster Pendidikan
 - 1) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.
- d. Klaster Penilaian dan Pengembangan Kompetensi
 - 1) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University Kementerian Pertanian).
 - 2) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian.
 - 3) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) disusun untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan pertanian nasional. Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

Penyusunan kerangka kelembagaan BPPSDMP mempertimbangkan beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1. Fungsi dan struktur organisasi, yaitu kejelasan pembagian peran antara unit pusat dan daerah serta antarunit internal Kementerian Pertanian.
2. Tata laksana antarunit organisasi, yaitu penguatan mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan alur komando dalam penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan vokasi, dan pelatihan SDM pertanian.
3. Pengelolaan SDM pertanian, yaitu pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi, kuantitas, dan kualitas penyuluhan, petani, serta ASN pertanian secara berkelanjutan.

Kerangka kelembagaan BPPSDMP dirancang berdasarkan kaidah sebagai berikut:

1. Selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi Presiden.
2. Berlandaskan kebijakan dan regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan eksisting, khususnya terkait potensi tumpang tindih kewenangan dan adanya kekosongan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) saat ini, teridentifikasi beberapa permasalahan utama dan kebutuhan desain organisasi BPPSDMP, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Desain Kriteria dalam Kerangka Kelembagaan Badan PPSDMP 2025 – 2029

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain Kriteria yang Dibutuhkan Badan PPSDMP
1	Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas BPPSDMP, sementara kewenangan penyelenggaraan penyuluhan di daerah berada pada pemerintah daerah	Diperlukan unit kerja setingkat UKE I yang berperan dalam pembinaan penyuluhan dan pengendalian mutu penyuluhan secara nasional (fungsi corporate university)
2	Belum terdapat unit kerja yang secara khusus menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara komprehensif	Diperlukan unit kerja setingkat Eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi

Pendekatan penguatan kelembagaan BPPSDMP juga mengacu pada **Rumah Strategi Kementerian Pertanian**, di mana BPPSDMP berkontribusi langsung terhadap pencapaian **Pilar 7, yaitu regenerasi petani dan pengembangan usaha tani**. Kontribusi optimal tersebut memerlukan dukungan kelembagaan berupa unit kerja setingkat Eselon I yang secara khusus menangani regenerasi petani dan pengembangan usaha tani.

Unit kerja Eselon I tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai **Corporate University Kementerian Pertanian**, dengan struktur organisasi berbasis fungsi. Fokus utama pengembangan unit kerja ini adalah mendukung keberhasilan regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui:

1. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan kompetensi penyuluhan;
2. pembinaan pendidikan formal di bidang pertanian;
3. pengembangan kompetensi SDM pertanian;

4. pembangunan kesadaran dan karakter SDM pertanian;
5. pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat dua kebutuhan utama desain organisasi BPPSDMP. Pertama, penerapan **struktur organisasi hybrid**, yaitu kombinasi antara struktur berbasis kelompok komoditas (Unit Eselon II teknis) dan struktur berbasis fungsi (dukungan manajemen). Kedua, pembentukan **unit kerja teknis setingkat Eselon II berbasis fungsi**, yang meliputi:

1. penyuluhan dan pembinaan penyuluhan;
2. pengelolaan pendidikan bidang pertanian;
3. pengembangan kompetensi SDM pertanian; dan
4. pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Implikasi Strategis

1. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknis

BPPSDMP berperan dalam penguatan kapasitas SDM pertanian, sementara Direktorat Jenderal Teknis bertanggung jawab pada aspek produksi, pengolahan, dan hilirisasi. Desain kelembagaan yang jelas akan mempertegas dukungan SDM terhadap keberhasilan program teknis, seperti peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, dan penerapan teknologi pertanian.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Fragmentasi kewenangan penyuluhan antara pusat dan daerah diatasi melalui penegasan peran BPPSDMP sebagai pengendali mutu, pembina standar, dan penetapan kurikulum nasional penyuluhan. Pemerintah daerah tetap melaksanakan penyuluhan sesuai karakteristik wilayah, dengan mengacu pada standar nasional yang ditetapkan BPPSDMP.

3. Integrasi dengan Program Strategis Nasional

Desain kelembagaan berbasis corporate university menempatkan BPPSDMP sebagai pusat pembelajaran nasional yang mengintegrasikan pendidikan vokasi, penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi berbasis praktik. Integrasi ini memperkuat kontribusi BPPSDMP terhadap sasaran strategis RPJMN, khususnya dalam regenerasi petani dan peningkatan kelas usaha tani.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja didefinisikan sebagai penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Definisi tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kegiatan. Penetapan target kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja harus dilengkapi dengan target kinerja yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai secara kuantitatif dalam periode Renstra.

Pendekatan perumusan target kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dilakukan melalui penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian. Pohon kinerja merupakan kerangka yang memetakan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam lingkup Kementerian Pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan vertikal antara sasaran program BPPSDMP dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian, serta keselarasan horizontal antarprogram dan kegiatan dalam lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target kinerja BPPSDMP disusun selaras dengan kerangka pencapaian kinerja Kementerian Pertanian dan menjamin kontribusi langsung BPPSDMP terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Pertanian.

Tabel 4. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025 – 2029

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP	Indeks	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806

Berdasarkan Tabel diatas, kinerja BPPSDMP periode 2025–2029 dijabarkan ke dalam satu sasaran program, yaitu **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.”** Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui satu indikator kinerja program, yaitu **“Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas,”** dengan satuan persentase (%). Target pertumbuhan ditetapkan sebesar **1 persen per tahun** secara konsisten mulai tahun 2025 hingga 2029. Penetapan target ini mempertimbangkan kondisi awal (baseline) pelaku usaha tani, karakteristik proses kenaikan kelas usaha yang bersifat bertahap dan memerlukan waktu, serta kapasitas intervensi BPPSDMP yang berfokus pada peningkatan kompetensi, perubahan perilaku usaha, dan penguatan kelembagaan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas proses tersebut, target 1 persen per tahun ditetapkan sebagai target yang **realistik, terukur, dan berkelanjutan**, sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran program dan indikator kinerja tersebut merepresentasikan upaya peningkatan skala usaha pertanian secara berkelanjutan. Indikator “pelaku usaha tani yang naik kelas” mengukur persentase pelaku usaha tani yang berhasil meningkatkan kapasitas atau kategori skala usahanya ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Kenaikan kelas usaha tidak hanya mencerminkan peningkatan volume atau nilai usaha, tetapi juga menunjukkan perbaikan dalam aspek manajerial, akses pasar, adopsi teknologi, serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan kelas usaha tani dipandang sebagai indikator antara yang relevan dalam mendorong peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Istilah “kelas” dalam konteks usaha tani merujuk pada klasifikasi tingkat kemampuan atau kapasitas usaha tani berdasarkan kriteria dan instrumen pengukuran yang ditetapkan. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pelaku usaha tani dalam mengelola usahanya, khususnya dari aspek skala bisnis dan kinerja usaha. Melalui klasifikasi tersebut, perkembangan pelaku usaha tani dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis dari waktu ke waktu, sehingga intervensi program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.

Cakupan usaha tani dalam sasaran program ini meliputi berbagai subsektor pertanian, antara lain tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, dengan jenis kegiatan usaha yang mencakup penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa penunjang di bidang pertanian. Seluruh cakupan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dilaksanakan secara komprehensif, mencakup seluruh rantai nilai sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

Dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut, BPPSDMP mendorong transformasi pelaku usaha pertanian menuju skala usaha yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis secara berkelanjutan.

Selain sasaran program tersebut, BPPSDMP juga menetapkan sasaran strategis di bidang tata kelola birokrasi, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan BPPSDMP yang baik, transparan, dan akuntabel.”** Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui **Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan BPPSDMP”**.

Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi BPPSDMP secara komprehensif, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas proses bisnis, serta kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi. Target Indeks Tata Kelola Birokrasi BPPSDMP ditetapkan meningkat secara bertahap dari **0,7798 pada tahun 2025** menjadi **0,7806 pada tahun 2029**, yang mencerminkan komitmen BPPSDMP dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap tata kelola organisasi.

Penetapan target indeks secara gradual mempertimbangkan karakteristik reformasi birokrasi sebagai proses perubahan struktural dan kultural yang memerlukan waktu, konsistensi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan pencapaian sasaran strategis tata kelola tersebut, BPPSDMP diharapkan mampu menyediakan fondasi birokrasi yang profesional dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan pengembangan usaha tani.

Dengan demikian, sasaran program dan sasaran strategis BPPSDMP 2025–2029 dirancang saling melengkapi, di mana peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani sebagai sasaran substantif didukung oleh penguatan tata kelola birokrasi sebagai sasaran pendukung. Keterpaduan kedua

sasaran tersebut menjadi landasan bagi kontribusi BPPSDMP terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjabaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target, sasaran, dan indikator kinerja Badan PPSDMP periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan estimasi total dana yang dibutuhkan selama lima tahun tersebut untuk mewujudkan sasaran strategis. Selain itu, kerangka pendanaan menguraikan alokasi pendanaan per tahun sesuai rencana strategis, sehingga dapat memastikan kecukupan dana untuk setiap tahap pencapaian target.

Selain memaparkan besarnya kebutuhan pendanaan, kerangka pendanaan juga menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber pendanaan utama meliputi:

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN):** bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
- **Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU):** skema kemitraan pemerintah dengan pihak swasta (public-private partnership) untuk pembiayaan program strategis.
- **Corporate Social Responsibility (CSR):** kontribusi pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Pemerintah menyadari pentingnya dukungan pihak non-pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, skema pendanaan alternatif seperti KPBU dan CSR dikembangkan sebagai upaya melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pendanaan program-program strategis. Keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan, mengingat keterbatasan kemampuan APBN dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Kerangka pendanaan Badan PPSDMP 2025–2029 selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1 Renstra, yang memuat matriks kebutuhan pendanaan beserta rencana pencapaian target kinerja untuk setiap program. Dengan kerangka pendanaan tersebut, diharapkan alokasi dan distribusi dana dapat dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.



BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2025–2029 disusun sebagai **acuan pembangunan sumber daya manusia pertanian** dalam mendukung arah kebijakan dan sasaran pembangunan pertanian nasional. Renstra ini digunakan oleh seluruh jajaran BPPSDMP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis global dan nasional, termasuk tantangan regenerasi petani, kebutuhan peningkatan produktivitas pangan, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, penguatan kualitas sumber daya manusia pertanian ditempatkan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Visi BPPSDMP 2025–2029 menegaskan komitmen untuk membangun sumber daya manusia pertanian yang produktif, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi pembangunan pertanian nasional.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh sinergi lintas pemangku kepentingan serta konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, BPPSDMP diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang adaptif dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Pertanian Maju Berkelanjutan serta kontribusi terhadap visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.



Lampiran 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BADAN PPSDMP 2025 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PERTANIAN										31.894.909,14	40.145.000,00	60.193.793,69	60.656.775,67	62.016.790,88	Menteri Pertanian
SS.1	Meningkatnya pendapatan petani									858.455,371	4.058.552,540	7.878.576,000	8.070.852,000	8.704.775,000	29.571.210,91
	IKSS 1.1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	Nilai	122,27	123,64	125,02	126,42	127,84	129,27						BPPSDMP
	IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	%	3,22	3,50	3,80	4,00	3,60	3,30						BPPSDMP
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										303.688,924	3.310.859,797	3.866.553,010	4.235.848,511	4.667.956,018	
SP.10	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel									303.688,924	3.310.859,797	3.866.553,010	4.235.848,511	4.667.956,018	
	IKSP 10.1	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP	Indeks	Indikator Baru	0,7798	0,7800	0,7802	0,7804	0,7806						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian										303.688,924	3.310.859,797	3.866.553,010	4.235.848,511	4.667.956,018	
SK.1	Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern	Pusat								1.912,54	0	0	0	0	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 1.1	Percentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP	%	90	90,00	90,40	90,60	90,80	91,00						
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	RO	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	21	15	-	-	-	-	1.912,54	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK.2	Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK	Pusat									2.223,77	0	0	0	0	Sekretariat Badan PPSDMP	
	IKSK 2.1	Percentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP		%	85,00	87,00	87,40	87,60	87,80	88,00							
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO	Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	3	22	-	-	-	-	2.223,77	-	-	-	-		
SK.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSDMP	Pusat									10.144,22	8.542,04	9.396,01	10.335,51	11.369,40	Sekretariat Badan PPSDMP	
	IKSK 3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP		Nilai	94,09	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00							
	KRO	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	RO	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Layanan	7	10	-	-	-	-	10.144,22	-	-	-	-		
	RO	Layanan Manajemen Kinerja		Layanan	RO Baru	-	10	10	10	10	-	8.542,04	9.396,01	10.335,51	11.369,40		
SK.4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP	Pusat		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64		877,00	1.458,00	4.604,00	4.964,00	5.341,00	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP															
	KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat															
	RO	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Masyarakat		Layanan	Ro Baru	-	-	1	1	1	-	-	1.500,00	1.600,00	1.700,00		
	KRO	Pelayanan Publik kepada Lembaga															

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Layanan Publik BPPSDMP Kepada Lembaga		Layanan	Ro Baru	-	-	1	1	1	-	-	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	RO	Layanan Hukum		Layanan	1	1	1	1	1	1	725,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	
	RO	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	6	1	1	1	1	1	152,00	458,00	504,00	554,00	610,00	
SK.5	Meningkatnya kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP		Pusat	Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	282.588,45	3.297.202,76	3.830.538,00	4.190.692,00	4.615.923,62	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 5.1	Indeks Kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP														
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	RO	Layanan Umum		Layanan	2	2	2	4	4	4	3.678,00	3.236,00	3.228,00	3.601,00	3.732,00	
	RO	Layanan perkantoran		Layanan	22	25	25	25	25	25	259.580,00	3.274.276,76	3.797.205,00	4.153.875,00	4.574.914,62	
	KRO	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	RO	Layanan Sarana Internal		Unit	3	127	2	3	3	3	2.621,06	300,00	2.330,00	3.363,00	4.399,00	
	RO	Layanan Prasarana Internal		Unit	RO Baru	1	3	3	3	3	1.049,90	432,00	3.475,00	4.523,00	5.575,00	
	KRO	Layanan Manajemen SDM Internal														
	RO	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	325	1.275	170	170	170	170	15.659,49	13.000,00	15.800,00	16.030,00	17.803,00	
	KRO	Koordinasi														

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	-	1	1	1	1	-	5.958,00	8.500,00	9.300,00	9.500,00	
SK.6	Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP		Pusat								748,74	1.000,00	2.100,00	2.210,00	2.331,00	Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 6.1	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi sesuai kewenangan Badan PPSDMP		%	Indikator Baru	100	100	100	100	100						
	KRO	Layanan Dukungan Manajemen Internal														
	RO	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Layanan	1,00	1	1	1	1	1	748,74	1.000,00	2.100,00	2.210,00	2.331,00	
SK.7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian		UPT								4.005,20	1.771,00	12.648,00	17.759,00	19.470,00	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
	IKSK 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3,56	3,58	3,60	3,62	3,66						
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	1	-	1	1	1	266,20	-	2.250,00	3.250,00	4.000,00	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja sama di bidang perpustakaan dan literasi pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	1	1	1	-	-	2.360,00	3.866,00	4.112,00	
	KRO	Pelayanan Publik kepada Masyarakat														
	RO	Layanan Publik BB Pustaka kepada Masyarakat		Orang	RO Baru	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.539,00	1.606,00	5.606,00	6.693,00	7.138,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	KRO	Pelayanan Publik kepada Lembaga														
	RO	Layanan Publik BB Pustaka kepada Lembaga		Layanan	RO Baru	6	5	5	5	5	200,00	165,00	2.432,00	3.950,00	4.220,00	
SK.8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian		UPT								1.189,00	886,00	7.267,00	9.888,00	13.521,00	Museum Tanah dan Pertanian
	IKSK 8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian		Skala Likert (1-4)	Indikator Baru	3.56	3.58	3.60	3.62	3.66						
	IKSK 8.2	Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah dan pertanian		Orang	Indikator Baru	12.200	10.000	25.000	27.000	30.000						
	KRO	Pelayanan Publik kepada masyarakat														
	RO	Layanan Publik Museum Tanah dan Pertanian Kepada Masyarakat		Orang	RO Baru	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	989,00	886,00	2.275,00	3.072,00	4.579,00	
	IKSK 8.3	Jumlah koleksi museum yang dikelola		Unit	Indikator Baru	1	2	2	2	3						
	IKSK 8.4	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		Unit	Indikator Baru	3	5	5	5	5						
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	RO Baru	1	-	1	1	1	200,00	-	2.482,00	3.700,00	4.620,00	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja sama di bidang museum tanah dan pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	1	1	1	-	-	2.510,00	3.116,00	4.322,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI										554.766,45	747.692,74	3.789.387,09	3.954.388,15	4.140.070,22	BPPSDMP
SP1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani			Indikator Baru						554.766,45	747.692,74	3.789.387,09	3.954.388,15	4.140.070,22	BPPSDMP
	IKSP1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%		1	1	1	1	1						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN										72.190,61	72.723,84	353.846,69	374.178,75	395.073,82	
SK.1	Meningkatnya kompetensi petani	Pusat		Indikator Baru						19.500,22	1.240,00	13.958,00	15.171,00	16.494,00	Pusat Pelatihan Pertanian
	IKSK 1.1	SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)	Pusat	%	Indikator Baru	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50					
	KRO	Koordinasi													
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	-	1	1	500,22	-	3.473,00	3.647,00	3.829,00	
	KRO	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria													
	RO	Peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian		NSPK	6	6	-	8	8	9.000,00	-	8.470,00	9.317,00	10.249,00	
	KRO	Data dan Informasi Publik													
	RO	Data dan informasi pelatihan pertanian		Dokumen	RO Baru	-	-	1	1	-	-	1.815,00	1.997,00	2.196,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga													
	RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	10	10	10	-	190,00	200,00	210,00	220,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat													

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	RO	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani		Kelompok Masyarakat	1.691	1.691	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-		
	KRO	Kerja Sama															
	RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	10	-	-	-	0	1.050,00	-	-	-		
SK.2	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)				Indikator Baru						500,00	2.957,50	13.397,00	14.322,00	15.434,00	Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian	
	IKSK 2.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00							
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan															
	RO	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur		Orang	RO Baru	-	438	726	726	726	-	2.630,00	6.065,00	6.368,00	6.687,00		
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM															
	RO	Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Orang	RO Baru	-	90	120	150	180	0	247,50	363,00	499,00	659,00		
	KRO	Koordinasi															
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	-	1	1	1	250,00	-	992,00	1.042,00	1.094,00		
	KRO	Kerja Sama															

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	1	1	1	-	-	110,00	116,00	122,00	
	IKSK 2.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	25	23	21	19	17						
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi non aparatur		Orang	RO Baru	-	-	90	90	90	-	-	315,00	315,00	315,00	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM														
	RO	Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian		Orang	RO Baru	-	-	120	150	180	-	-	363,00	499,00	659,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
	RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	4	74	72	72	-	80,00	4.079,00	4.167,00	4.376,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	1	-	1	1	1	250,00	-	1.000,00	1.200,00	1.400,00	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	1	1	1	-	-	110,00	116,00	122,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)				Indikator Baru						32.856,38	57.834,20	296.491,69	314.685,75	333.145,82	- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan)
	IKS.K 3.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20	18	16	14	12						
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur		Orang	2.328	2.028	18.567	31.258	33.258	35.258	8.249,85	20.716,66	127.156,74	135.292,69	143.428,64	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM														
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	630	211	1.000	1.386	1.722	2.058	483,78	2.879,00	4.211,00	5.750,00	7.555,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	8	-	9	9	9	2.000,00	-	7.814,25	7.814,25	7.814,25	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	
	IKS.K 3.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		%	Indikator Baru	25	23	21	19	17						
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Pelatihan pertanian bagi non aparatur		Orang	15.409	72.171	33.685	35.685	37.685	39.685	20.122,74	33.558,55	124.897,50	131.897,50	138.897,50	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM														
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	RO Baru	-	-	2.000	2.500	3.000	-	-	6.076,48	7.595,60	9.114,72	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
	RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	34	514	514	514	-	680,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	7	-	9	9	9	2.000	-	8.930,57	8.930,57	8.930,57	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	
SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan				Indikator Baru						19.334,01	10.692,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- BBPMKP - BBPP - Bapelttan
	IKSK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	UPT	Skala Likert (1-5)	Indikator Baru	4	4,1	4,2	4,3	4,4						
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup														
	RO	Sarana pelatihan pertanian		Unit	10	10	10	10	10	10	4.334,01	3.992,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
	RO	Prasarana Pelatihan Pertanian		Unit	RO Baru	1	9	10	10	10	15.000,00	6.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN										106.324,43	430.328,00	2.613.322,18	2.665.707,18	2.725.692,18		
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian			Indikator Baru						106.324,423	417.828,00	1.603.122,18	1.654.007,18	1.712.492,18	Pusat Penyuluhan Pertanian	
	IKSK 1.1	Percentase penyuluhan yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluhan (ASN) (%)	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	%	Indikator Baru	6	7	8	9	10						
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														
	RO	Insentif Kinerja Penyuluhan Pertanian		Orang	38.831	10.510	37.605	75.658	75.658	75.658	58.236,00	135.078,00	390.504,18	390.504,18	390.504,18	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
	RO	Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan yang terfasilitasi pertanian		Lembaga	6	-	543	5.829	5.829	5.829	-	10.860,00	757.770,00	816.060,00	874.350,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	6	6	-	39	39	39	20.388,43	-	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
	KRO	Data dan Informasi Publik														
	RO	Data dan informasi penyuluhan pertanian		Dokumen	RO Baru	-	39	39	39	39	-	2.280,00	2.730,00	2.925,00	3.120,00	
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
	RO	Sarana Pengukuran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		Unit	RO Baru	-	38	38	38	38	-	2.280,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	RO	Sarana Kerja Penyuluhan Pertanian		Unit	RO Baru		10.000	10.000	10.000	10.000	-	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	RO	Sarana Operasional Swasembada Pangan dan Hilirisasi		Unit	RO Baru	-	20	-	-	-	-	11.900,00	-	-	-	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	KRO	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi														
	RO	Sarana TIK penyuluhan pertanian		Unit	RO Baru	-	38	39	39	39	27.700,00	2.280,00	24.618,00	24.618,00	24.618,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah														
	RO	Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi		Provinsi	38	39	38	38	38	38	-	2.850,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
	KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Rekomendasi kebijakan terhadap pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya		Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	1	1	-	-	-	300,00	7.600,00	-	-	
SK.2	Meningkatnya jumlah petani milenial				Indikator Baru						-	12.500,00	1.010.200,00	1.011.700,00	1.013.200,00	Pusat Penyuluhan Pertanian
	IKSK 2.1	Persentase petani muda terhadap jumlah petani	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	%	Indikator Baru	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43						
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
	RO	Fasilitasi dan pembinaan Brigade Pangan		Kelompok Masyarakat	RO Baru	-	-	5.000	5.000	5.000	-	-	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
	RO	Percontohan penerapan Teknologi Pertanian		Kelompok Masyarakat	420	-	1.250	5.829	5.829	5.829	-	12.500,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	
	KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
	RO	Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani dan Brigade		NSPK	RO Baru	-	-	2	2	2	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Pangan														
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kelompok Masyarakat	6	-	-	39	39	39	-	-	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	IKSK 2.2	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi	Kelompok Masyarakat	Indikator Baru	125	130	135	140	145	-	-	20.250,00	21.000,00	21.750,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
	RO	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi		Kelompok Masyarakat	RO Baru	-	-	135	140	145	-	-	20.250,00	21.000,00	21.750,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kelompok Masyarakat	6	-	-	1	1	1	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN											375.052,00	238.230,00	809.131,22	898.682,22	1.000.688,22	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian				Indikator Baru						375.052,00	238.230,00	809.131,22	898.682,22	1.000.688,22	Pusat Pendidikan Pertanian - Polbangtan - SMK-PP
	IKSK 1.1	Percentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian	Pusat dan UPT	%	Indikator Baru	80,00	80,10	80,20	80,20	80,20						
	KRO	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan														
	RO	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV)	UPT	Unit	4.476	4.886	4.960	5.100	5.200	5.300	109.201,00	161.500,00	195.415,00	214.957,00	236.452,00	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III)	UPT	Unit	925	908	950	990	1.100	1.200	16.521,00	27.138,00	32.836,00	36.119,00	39.731,00	
	RO	Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian	UPT	Unit	1.209	1.053	950	1.053	1.053	1.053	12.007,00	18.475,00	24.020,22	24.020,22	24.020,22	
	KRO	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan														
	RO	Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT	UPT	Kekayaan Intelektual	RO Baru	-	-	80	80	80	-	-	7.260,00	7.986,00	8.785,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			RO Baru											
	RO	Pengabdian kepada masyarakat	Pusat dan UPT	Orang	RO Baru	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	10.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	
	RO	Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian	UPT	Orang	RO Baru	83.780	-	-	-	-	128.810,00	-	-	-	-	
	RO	Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas petani	UPT	Orang	RO Baru	10.000	-	10.000	10.000	10.000	42.823,55	-	184.000,00	220.000,00	266.000,00	
	KRO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Pusat dan UPT	Kegiatan	12	8	-	12	12	12	5.750,00	-	44.600,00	56.100,00	67.700,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YES)	Pusat dan UPT	Kegiatan	1	1	-	-	-	-	12.359,45	-	-	-	-	
	KRO	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
	RO	Peraturan /norma/ pedoman pendidikan pertanian	Pusat	NSPK	6	6	-	7	7	7	10.000,00	-	23.000,00	26.000,00	29.000,00	
	KRO	Data dan Informasi Publik														

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Data dan informasi pendidikan pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	1	12	12	12	-	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
	RO	Fasilitasi Perguruan Tinggi Mitra dan SMK-PP Binaan	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	100	12	12	12	-	1.130,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	RO	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Pertanian	Pusat dan UPT	Dokumen	RO Baru	-	1	12	12	12	-	1.070,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	KRO	Sarana Bidang Pendidikan														
	RO	Sarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	11	8	8	8	8	8	1.462,00	2.113,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	RO	Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit		3	3	3	3	3	890,00	1.715,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	KRO	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah														
	RO	Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian	UPT	Unit	RO Baru	1	3	3	3	3	228,00	3.789,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	
	KRO	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi														
	RO	Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian	UPT	Unit	RO Baru	1	7	8	8	8	35.000,00	10.300,00	16.000,00	20.000,00	24.000,00	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN											1.199,41	6.410,90	13.087,00	15.820,00	18.616,00	
SK.1	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian				Indikator Baru						1.199,41	6.410,90	13.087,00	15.820,00	18.616,00	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
	IKSK 1.1	Percentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	Pusat	%	Indikator Baru	80	82	84	86	88						

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKSK 1.2	Percentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian		%	Indikator Baru	25	50	60	70	80						
	KRO	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara														
	RO	Penilaian Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Orang	RO Baru	10	302	333	367	404	157.33	1.537,00	1.614,00	1.695,00	1.780,00	
	RO	Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Orang	RO Baru	-	260	286	315	347	-	1.833,00	1.925,00	2.021,00	2.112,00	
	KRO	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Kajian Kebijakan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	RO Baru	-	-	2	2	2	-	-	1.210,00	1.332,00	1.464,00	
	KRO	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria														
	RO	Peraturan / norma/ pedoman penilaian kompetensi ASN pertanian	Pusat	NSPK	RO Baru	1	-	7	7	7	19	-	3.000,00	3.300,00	3.630,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Pusat	Kegiatan	RO Baru	1	-	1	1	1	966	-	1.338,00	1.472,00	1.620,00	
	KRO	Kerja sama														
	RO	Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Kegiatan	RO Baru	-	-	1	1	1	-	-	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO	Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	RO Baru	3	1	1	1	1	57	1.146,90	1.000,00	1.500,00	2.000,00	
	KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
	RO	Prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian	Pusat	Unit	RO Baru	-	1	1	1	1	-	1.894,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
© 2025